



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 32 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS**

**(KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES  
ARSIP DINAMIS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis yang di dalamnya terlampir Kode Klasifikasi dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut;
  - b. bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis (Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 969);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS (KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah satuan kerja atau unit yang menjalankan salah satu tugas dan fungsi organisasi.
6. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan kearsipan.
7. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungan kerjanya.
8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan Organisasi Politik, Organisasi

Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

10. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
11. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
12. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
13. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
14. Pencipta arsip adalah pihak-pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
15. Arsip Elektronik adalah arsip yang diciptakan (dibuat dan diterima) dalam format elektronik atau arsip hasil alih media dari arsip kertas.
16. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
17. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
18. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
19. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
20. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu

- jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
21. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya disebut JRA Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip fasilitatif.
  22. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif.
  23. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
  24. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
  25. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
  26. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
  27. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah atau Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
  28. Akses arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
  29. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan pengelompokannya.
  30. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
  31. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.

32. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
33. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
34. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
35. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
36. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
37. Tingkat klasifikasi keamanan akses arsip dinamis adalah pengelompokan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis yang di dalamnya terlampir Kode Klasifikasi dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman dalam penggunaan kode klasifikasi, dan penentuan hak akses dan keamanan dalam keseluruhan proses pengelolaan arsip;
- b. terwujudnya sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan arsip; dan
- c. sebagai sumber informasi pengelolaan arsip yang mengarah pada penyatuan informasi yang bersifat integratif, sistemik dan simultan.

Pasal 3

- 1) Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yakni fungsi fasilitatif dan fungsi substantif.
- 2) Adapun fungsi fasilitatif meliputi urusan:
  - a. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - b. perlengkapan;
  - c. pengadaan;
  - d. perpustakaan;
  - e. kearsipan;
  - f. persandian;
  - g. perencanaan pembangunan;
  - h. organisasi dan tatalaksana;
  - i. penelitian pengkajian, pengembangan;
  - j. hukum;
  - k. hubungan masyarakat;
  - l. pengawasan internal;
  - m. sumber daya manusia;
  - n. pendidikan dan pelatihan; dan
  - o. keuangan daerah.
- 3) Adapun fungsi substantif meliputi urusan:
  - a. otonomi daerah;
  - b. pemerintahan umum;
  - c. kesatuan bangsa dan politik;
  - d. pemilu;
  - e. satuan polisi pamong praja;
  - f. penanggulangan bencana, pencarian, pertolongan;
  - g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - h. pendidikan;
  - i. keolahragaan;
  - j. kepemudaan;
  - k. kebudayaan;
  - l. kesehatan;
  - m. agama dan kepercayaan;
  - n. sosial;
  - o. pemberdayaan masyarakat desa;
  - p. kependudukan dan catatan sipil;

- q. keluarga berencana;
- r. ketahanan pangan;
- s. perdagangan;
- t. koperasi dan ukm;
- u. kelautan dan perikanan;
- v. pertanian;
- w. peternakan;
- x. perindustrian;
- y. perhubungan;
- z. komunikasi dan informatika;
- aa. pariwisata dan ekonomi kreatif;
- bb. statistik;
- cc. ketenagakerjaan;
- dd. penanaman modal;
- ee. pertanahan;
- ff. transmigrasi;
- gg. pekerjaan umum;
- hh. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- ii. tata ruang (tata kota); dan
- jj. lingkungan hidup.

### BAB III

#### KLASIFIKASI ARSIP

##### Pasal 4

- (1) Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kode klasifikasi arsip yang digunakan menggunakan sistem pengkodean berdasarkan angka (*numeric*).
- (3) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan kembali arsip.

##### Pasal 5

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati bermaksud sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam memberikan layanan penggunaan Arsip Dinamis.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini yaitu terwujudnya layanan arsip secara cepat, tepat, dan aman.

#### Pasal 7

Ruang Lingkup Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- b. pengaturan akses arsip.

### BAB IV

#### SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

#### Pasal 8

- (1) Sistem Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diatur dengan ketentuan arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat informasi yaitu:
  1. sangat rahasia;
  2. rahasia;
  3. terbatas; dan
  4. biasa.
- (2) Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa.
- (3) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
- (4) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu klasifikasi informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

- (5) Biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu klasifikasi informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

#### Pasal 9

Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditentukan berdasarkan:

- a. ketentuan hukum;
- b. analisis fungsi unit kerja dan uraian jabatan (*job description*); dan
- c. analisis risiko.

### BAB V

#### KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

#### Pasal 10

- (1) Hak Akses Arsip Dinamis menjadi kewenangan pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat tinggi pratama;
  - b. pejabat administrator/jabatan yang setara dengan pejabat administrator; dan
  - c. pejabat pengawas/jabatan yang setara dengan pejabat pengawas.

#### Pasal 11

- (1) Arsip Dinamis Pemerintah Daerah dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Penentu Kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Daerah/Instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya.
    2. Pimpinan tingkat tinggi, yaitu sekretaris, Kepala Bidang yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi yang

BAB VI  
UNIT PENGOLAH

Pasal 13

Unit Pengolah sebagai unit kerja yang menciptakan arsip bertanggung jawab terhadap layanan penggunaan, penjagaan keselamatan dan keamanan fisik dan informasi arsip yang dikategorikan sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 31) dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Rekca	[Signature]
2	Asisten III	[Signature]
3	Kabag Hukum	[Signature]
4	Kadis Perpustip	[Signature]
5	Kabid Arsipda	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia,  
pada tanggal, 19 Oktober 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia,  
pada tanggal, 19 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

(KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI

KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS) DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BOMBANA

**KLASIFIKASI ARSIP**

**000 UMUM**

**000.1**

**KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN**

- 000.1.1 Telekomunikasi
- 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  - 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
  - 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
  - 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
  - 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
  - 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
  - 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya
- 000.1.5 Rapat pimpinan
- 000.1.6 Penyediaan Konsumsi
- 000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
  - 000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
  - 000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
  - 000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
- 000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
  - 000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
  - 000.1.8.2 Penghijauan
  - 000.1.8.3 Perbaikan Gedung
  - 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
  - 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
  - 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
- 000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
  - 000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
  - 000.1.9.2 Pemasangan
- 000.1.10 Ketertiban dan Keamanan

- 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
- 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
- 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
- 000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya
- 000.2 PERLENGKAPAN**
  - 000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
    - 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
    - 000.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
  - 000.2.2 Pemeliharaan Peralatan kantor
    - 000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
    - 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
  - 000.2.3 Distribusi
    - 000.2.3.1 Barang habis pakai
    - 000.2.3.2 Barang milik daerah
  - 000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan
  - 000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah
- 000.3 PENGADAAN**
  - 000.3.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
  - 000.3.2 Pengadaan Langsung, antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak
  - 000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak
  - 000.3.4 Swakelola, antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
  - 000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa
  - 000.3.6 Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi
- 000.4 PERPUSTAKAAN**
  - 000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

- 000.4.2 Deposit Bahan Pustaka
  - 000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
  - 000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
  - 000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional
  - 000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
  - 000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog
- 000.4.3 Koleksi Pustaka
  - 000.4.3.1 Pembelian
  - 000.4.3.2 Hibah
  - 000.4.3.3 Hadiah
  - 000.4.3.4 Tukar Menukar
  - 000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR
  - 000.4.3.6 Terbitan Internal
  - 000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus
  - 000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
- 000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka
- 000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi
- 000.4.6 Layanan Perpustakaan
  - 000.4.6.1 Keanggotaan
  - 000.4.6.2 Peminjaman
  - 000.4.6.3 Pengembangan gemar baca
- 000.4.7 Kerjasama Perpustakaan
  - 000.4.7.1 MoU
  - 000.4.7.2 Perjanjian kerjasama
  - 000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
- 000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
  - 000.4.8.1 Pengembangan situs web
  - 000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
  - 000.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan
  - 000.4.8.4 Pengembangan pangkalan data keperustakaan digital
- 000.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
- 000.4.10 Konservasi
  - 000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
  - 000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
  - 000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan
- 000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
- 000.4.12 Transformasi Digital
- 000.4.13 Kurasi Digital
- 000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
  - 000.4.14.1 Perpustakaan Umum
  - 000.4.14.2 Perpustakaan Khusus

- 000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
- 000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi
- 000.5 KEARSIPAN**
  - 000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 000.5.2 Pembinaan Kearsipan
    - 000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
    - 000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
    - 000.5.2.3 Penilaian Arsiparis
    - 000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
    - 000.5.2.5 Data Base Arsiparis
    - 000.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan
    - 000.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
    - 000.5.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
    - 000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
    - 000.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
    - 000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
  - 000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis
    - 000.5.3.1 Penciptaan, antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi
    - 000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif, antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas
    - 000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif, antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik
    - 000.5.3.4 Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip
    - 000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis

- 000.5.4 Program Arsip Vital, antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital
- 000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga
- 000.5.6 Penyusutan Arsip
  - 000.5.6.1 Pemindahan Arsip, antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan
  - 000.5.6.2 Pemusnahan Arsip, meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan
  - 000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis, meliputi: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan
- 000.5.7 Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan
- 000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
  - 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
  - 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
- 000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis
  - 000.5.9.1 Akuisisi, meliputi: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan
  - 000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan

- 000.5.9.3 Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip
- 000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis
- 000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide
- 000.5.9.6 Preservasi Preventif, antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
- 000.5.9.7 Preservasi Kuratif
- 000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis
- 000.5.9.9 Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber
- 000.5.10 Jasa Kearsipan, antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip
- 000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN
- 000.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
- 000.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
- 000.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
- 000.5.15 Pengawasan Kearsipan
  - 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
  - 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
  - 000.5.15.3 Sanksi
- 000.6 PERSANDIAN**
  - 000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 000.6.2 Pengamanan persandian
    - 000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto
    - 000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto
    - 000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan
  - 000.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
    - 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
    - 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian
    - 000.6.3.3 Pelaksanaan
    - 000.6.3.4 Pelaporan
  - 000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
    - 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

- 000.6.5
  - 000.6.4.2 Jaring Komunikasi
  - Layanan Sertifikasi Elektronik
  - 000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
  - 000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
  - 000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
  - 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
  - 000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
  - 000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
  - 000.6.5.7 Pelaporan

**000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

- 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
  - 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
  - 000.7.1.2 Musrenbang Nasional
  - 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
  - 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
  - 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
  - 000.7.1.6 Musrenbang Desa
- 000.7.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
  - 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
  - 000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
  - 000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
  - 000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - 000.7.2.6 Program kerja tahunan
  - 000.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
  - 000.7.2.8 Laporan Berkala
  - 000.7.2.9 Laporan Insidental
  - 000.7.2.10 Evaluasi Program
- 000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
- 000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
- 000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
- 000.7.6 Aksi Strategis Daerah
  - 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
  - 000.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
  - 000.7.6.3 Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
  - 000.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
  - 000.7.6.5 Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
- 000.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
  - 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah

- 000.7.7.2 Pendanaan Daerah
- 000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
- 000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
- 000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

**000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

- 000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  - 000.8.1.1 Pembentukan
  - 000.8.1.2 Pengubahan
  - 000.8.1.3 Pembubaran
- 000.8.2 Uraian Jabatan dan Tata Kerja
  - 000.8.2.1 Analisa Jabatan
  - 000.8.2.2 Analisa Beban Kerja
- 000.8.3 Ketatalaksanaan
  - 000.8.3.1 Proses Bisnis
  - 000.8.3.2 Standar Pelayanan
  - 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
  - 000.8.3.4 Pelayanan Publik
- 000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
- 000.8.5 Evaluasi Kelembagaan
- 000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
  - 000.8.6.1 Budaya Kerja
  - 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
  - 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN**

- 000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- 000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi
- 000.9.3 Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan
- 000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
- 000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - 000.9.6.1 Data
  - 000.9.6.2 Statistik
  - 000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
- 000.9.7 Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 000.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- 000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
- 000.9.10 Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop

## **100 PEMERINTAHAN**

### **100.1 OTONOMI DAERAH**

- 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
- 100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
- 100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
  - 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
  - 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
  - 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
  - 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
  - 100.1.4.5 Assosiasi Daerah
- 100.1.5 Otonomi khusus dan daerah istimewa
- 100.1.6 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
  - 100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
  - 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah
- 100.1.7 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

### **100.2 PEMERINTAHAN UMUM**

- 100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
  - 100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  - 100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
  - 100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah

- 100.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan
- 100.2.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum
- 100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
  - 100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah
  - 100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
  - 100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah
  - 100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
  - 100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah
- 100.3 HUKUM**
  - 100.3.1 Program Legislasi
    - 100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
    - 100.3.1.2 Program Legislasi
  - 100.3.2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan
  - 100.3.3 Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
    - 100.3.3.1 Keputusan/Ketetapan Gubernur
    - 100.3.3.2 Keputusan/Ketetapan Bupati
    - 100.3.3.3 Keputusan/Ketetapan Walikota
    - 100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
    - 100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
    - 100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota
  - 100.3.4 Instruksi/Surat Edaran
    - 100.3.4.1 Instruksi/Surat Edaran Provinsi
    - 100.3.4.2 Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
    - 100.3.4.3 Instruksi/Surat Edaran Kota
    - 100.3.4.4 Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
  - 100.3.5 Surat Perintah
    - 100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur
    - 100.3.5.2 Surat Perintah Bupati
    - 100.3.5.3 Surat Perintah Walikota
    - 100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II
  - 100.3.6 Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis
  - 100.3.7 Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
    - 100.3.7.1 Dalam Negeri
    - 100.3.7.2 Luar Negeri
  - 100.3.8 Dokumentasi Hukum, antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi

- 100.3.9 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
- 100.3.10 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
- 100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum
  - 100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
  - 100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata
  - 100.3.11.3 Tata Usaha Negara
  - 100.3.11.4 Perburuhan
  - 100.3.11.5 Arbitrase
  - 100.3.11.6 Sengketa Adat
- 100.3.12 Perijinan
- 100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
  - 100.3.13.1 Hak Cipta
  - 100.3.13.2 Hak Paten
  - 100.3.13.3 Hak Desain Industri
  - 100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
  - 100.3.13.5 Hak Merk
  - 100.3.14 Permohonan HaKI yang ditolak

## **200 POLITIK**

### **200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

- 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - 200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
  - 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
  - 200.1.2.3 Bela Negara
  - 200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
  - 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
- 200.1.3 Kewaspadaan Nasional
  - 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
  - 200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
  - 200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
  - 200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
  - 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
- 200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
  - 200.1.4.1 Ketahanan Seni
  - 200.1.4.2 Ketahanan Budaya
  - 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
  - 200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan

- 200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan
- 200.1.4.6 Fasilitasi
- 200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
- 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
- 200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
- 200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas
- 200.1.4.11 Fasilitasi Ormas
- 200.1.5 Politik Dalam Negeri
  - 200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
  - 200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
  - 200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
  - 200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
  - 200.1.5.5 Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
  - 200.1.5.6 Pemerintah Daerah
  - 200.1.5.7 Database Parpol
  - 200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
  - 200.1.5.9 Pemilihan Umum
- 200.1.6 Ketahanan Ekonomi
  - 200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
  - 200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
  - 200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat
  - 200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
- 200.2 PEMILU**
  - 200.2.1 Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 200.2.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
    - 200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
    - 200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)
    - 200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
    - 200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
    - 200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  - 200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
    - 200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
    - 200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
    - 200.2.3.3 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
    - 200.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual

- 200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu
  - 200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
  - 200.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
  - 200.2.4.3 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
  - 200.2.4.4 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
  - 200.2.4.5 Peta Daerah Pemilihan
- 200.2.5 Pencalonan Pemilu
  - 200.2.5.1 Petunjuk teknis pencalonan
  - 200.2.5.2 Surat pencalonan pendaftaran
  - 200.2.5.3 Daftar bakal calon
  - 200.2.5.4 Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
  - 200.2.5.5 Dokumen verifikasi administrasi
  - 200.2.5.6 Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
- 200.2.6 Kampanye Pemilu
  - 200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
  - 200.2.6.2 Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
  - 200.2.6.3 Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
- 200.2.7 Dana Kampanye
  - 200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye
  - 200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu
  - 200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye
- 200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara
  - 200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
  - 200.2.8.2 Master surat suara
  - 200.2.8.3 Surat suara yang terpakai
  - 200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
  - 200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
- 200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu
- 200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu
  - 200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
  - 200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon
  - 200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan
- 200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

- 300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
  - 300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
  - 300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
    - 300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja
    - 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
  - 300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
  - 300.1.4 Perlindungan Masyarakat
  - 300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  - 300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
  
- 300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN**
  - 300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
    - 300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
    - 300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
    - 300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
    - 300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
    - 300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
    - 300.2.2.6 Registrasi BEACON
  - 300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - 300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
  - 300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
    - 300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
    - 300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
    - 300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
    - 300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
    - 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
  - 300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
  - 300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
  - 300.2.8 Operasi Komunikasi
    - 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
    - 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
    - 300.2.8.3 Registrasi BEACON

- 300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
- 300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
- 300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
- 300.2.12 Pelaporan dan Evaluasi
  - 300.2.12.1 Laporan Harian
  - 300.2.12.2 Laporan Bulanan
  - 300.2.12.3 Laporan Tahunan
  - 300.2.12.4 Evaluasi

#### **400 KESEJAHTERAAN RAKYAT**

##### **400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

- 400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
  - 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan Ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
  - 400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
  - 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
  - 400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup
  - 400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan Inovasi
  - 400.1.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya
  - 400.1.2.7 Pemantauan dan Evaluasi
- 400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
  - 400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi Peningkatan Infrastruktur
  - 400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam Peningkatan Infrastruktur
  - 400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam Peningkatan Infrastruktur
  - 400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam Peningkatan Infrastruktur
  - 400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam Peningkatan Infrastruktur
  - 400.1.3.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur
  - 400.1.3.7 Pemantauan dan Evaluasi
- 400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
  - 400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
  - 400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
  - 400.1.4.3 Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
  - 400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha
  - 400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan

- 400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
- 400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
- 400.1.4.9 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
- 400.1.4.10 Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
- 400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
- 400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
- 400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
- 400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
- 400.1.5 **Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya**
  - 400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal
  - 400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat
  - 400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat
  - 400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
  - 400.1.5.5 Ketenagakerjaan
  - 400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
  - 400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.6 **Pengembangan Daerah Khusus**
  - 400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
  - 400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
  - 400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
  - 400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
  - 400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
  - 400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
  - 400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
  - 400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
    - 400.2.2.1 Data gender
    - 400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi

- 400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
  - 400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
  - 400.2.3.2 Data perlindungan perempuan
  - 400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi
  - 400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
  - 400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
  - 400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender
  - 400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
- 400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
  - 400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
  - 400.2.4.2 Data perlindungan anak
  - 400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
  - 400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
  - 400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
- 400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
  - 400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
  - 400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
  - 400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak
  - 400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi
  - 400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
  - 400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
- 400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
- 400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak
- 400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
- 400.3 PENDIDIKAN**
  - 400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
    - 400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
    - 400.3.2.2 Pelatihan Sosial
    - 400.3.2.3 Peringatan Hari anak
    - 400.3.2.4 Block Grant
  - 400.3.3 Pendidikan Masyarakat
    - 400.3.3.1 Penyelenggaraan Program
    - 400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial

- 400.3.3.3 Pembinaan Program
- 400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan
- 400.3.3.5 Pameran
- 400.3.3.6 Rakor
- 400.3.3.7 Sosialisasi
- 400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi
- 400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
- 400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
  - 400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar
  - 400.3.5.2 Block Grant
  - 400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
  - 400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan
  - 400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS)
  - 400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin
- 400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus
  - 400.3.6.1 Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran
  - 400.3.6.2 Block Grant
  - 400.3.6.3 Lomba, Festival
  - 400.3.6.4 Sosialisasi, Bimtek
  - 400.3.6.5 Pendataan
  - 400.3.6.6 Kelembagaan
- 400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
  - 400.3.7.1 Pendataan dan Pemeetaan
  - 400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru
  - 400.3.7.3 Sertifikasi Guru
  - 400.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
  - 400.3.7.5 Peningkatan kesejahteraan guru
  - 400.3.7.6 Sosialisasi, bimtek
  - 400.3.7.7 Block Grant
- 400.3.8 Sekolah Menengah Atas
  - 400.3.8.1 Kurikulum
  - 400.3.8.2 Bahan Ajar
  - 400.3.8.3 Pelatihan
  - 400.3.8.4 Block grant
  - 400.3.8.5 Bimbingan teknis/sosialisasi
  - 400.3.8.6 Lomba , Sayembara, festival
  - 400.3.8.7 Bantuan operasional Sekolah (BOS)
  - 400.3.8.8 Bantuan siswa miskin
- 400.3.9 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
  - 400.3.9.1 Bahan ajar
  - 400.3.9.2 Petunjuk Teknis
  - 400.3.9.3 Block grant
  - 400.3.9.4 Sosialisasi, bimtek
  - 400.3.9.5 Lomba, sayembara, jambore, festival
  - 400.3.9.6 Kurikulum/bahan pembelajaran
  - 400.3.9.7 Alat bantu pembelajaran

- 400.3.9.8 Pendataan
- 400.3.9.9 Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)
- 400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik
  - 400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan
  - 400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru
  - 400.3.10.3 Setifikasi Guru
  - 400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
  - 400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
  - 400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
  - 400.3.10.7 Block grant
  - 400.3.10.8 Bimbingan teknis/sosialisasi
- 400.3.11 Penilaian Pendidikan
  - 400.3.11.1 Penilaian Akademik
  - 400.3.11.2 Penilaian Non Akademik
  - 400.3.11.3 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
- 400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
  - 400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
  - 400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
- 400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
  - 400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
  - 400.3.13.2 Sarana Pendidikan
  - 400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi

#### **400.4 KEOLAHRAGAAN**

- 400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
  - 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
  - 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
  - 400.4.3.1 Olahraga Massal
  - 400.4.3.2 Olahraga Tradisional
  - 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
- 400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
  - 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
  - 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
  - 400.4.4.3 Olahraga Prestasi
  - 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga

- 400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
  - 400.4.5.1 Olahraga Tradisional
  - 400.4.5.2 Layanan Khusus
- 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
  - 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
  - 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
- 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
  - 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
  - 400.4.7.2 Kompetisi
  - 400.4.7.3 IPTEK Olahraga
- 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
  - 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
  - 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
- 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
  - 400.4.9.1 Industri Olahraga
  - 400.4.9.2 Promosi Olahraga
- 400.4.10 Olahraga Prestasi
  - 400.4.10.1 Daerah
  - 400.4.10.2 Nasional
  - 400.4.10.3 Internasional
- 400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
  - 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
  - 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
  - 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga

#### **400.5 KEPEMUDAAN**

- 400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
  - 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
  - 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
  - 400.5.2.3 Pengembangan
- 400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
  - 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
  - 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
  - 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum
- 400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
  - 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
  - 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
  - 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
- 400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
  - 400.5.5.1 Pengkajian
  - 400.5.5.2 Pengembangan
  - 400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)

- 400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
  - 400.5.6.1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
  - 400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
- 400.5.7 Kewirausahaan
  - 400.5.7.1 Kelembagaan
  - 400.5.7.2 Pengaderan
  - 400.5.7.3 Perintisan
- 400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
  - 400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
  - 400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
  - 400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
  - 400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
- 400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
  - 400.5.9.1 Standardisasi
  - 400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda
- 400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
  - 400.5.10.1 Kemitraan
  - 400.5.10.2 Penghargaan Pemuda

**400.6 KEBUDAYAAN**

- 400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
  - 400.6.2.1 Registrasi Nasional
  - 400.6.2.2 Pelindungan
  - 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
  - 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
- 400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
  - 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
  - 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
  - 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
  - 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi
- 400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
  - 400.6.4.1 Sejarah
  - 400.6.4.2 Pemetaan nilai
  - 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
  - 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
  - 400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
  - 400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah
- 400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya

- 400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya
- 400.6.5.2 Kekayaan budaya
- 400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
- 400.6.5.4 Diplomasi budaya

**400.7 KESEHATAN**

- 400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
  - 400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga
  - 400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
  - 400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer
  - 400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
  - 400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
  - 400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology
  - 400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah
  - 400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer
  - 400.7.2.9 Pembiayaan darah
  - 400.7.2.10 Penggunaan darah rasional
  - 400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
  - 400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
  - 400.7.2.13 Akreditasi puskesmas
  - 400.7.2.14 Puskesmas berprestasi
- 400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
  - 400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan
  - 400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
  - 400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat
  - 400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
  - 400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
  - 400.7.3.6 Pelayanan pasien jaminan kesehatan
  - 400.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
  - 400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit
  - 400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
  - 400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
- 400.7.4 Keperawatan dan keteknisian medik
  - 400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar
  - 400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di

- rumah sakit
- 400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
- 400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
- 400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan
- 400.7.5 Penunjang medik dan sarana kesehatan
  - 400.7.5.1 Mikrobiologi dan imunologi
  - 400.7.5.2 Patologi dan toksilogi
  - 400.7.5.3 Radiologi
  - 400.7.5.4 Perizinan dan sertifikasi
  - 400.7.5.5 Sarana dan prasarana Kesehatan
  - 400.7.5.6 Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
  - 400.7.5.7 Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
- 400.7.6 Kesehatan Jiwa
  - 400.7.6.1 Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
  - 400.7.6.2 Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
  - 400.7.6.3 Etikolegal dan asesmen
  - 400.7.6.4 Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
  - 400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen
  - 400.7.6.6 Kesehatan jiwa kelompok beresiko
- 400.7.7 Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
  - 400.7.7.1 Surveilans dan respon kejadian luar biasa
  - 400.7.7.2 Imunisasi
  - 400.7.7.3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
  - 400.7.7.4 Kesehatan matra
- 400.7.8 Pengendalian penyakit menular langsung
  - 400.7.8.1 Pengendalian tuberkolosis
  - 400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
  - 400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
  - 400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
  - 400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia
- 400.7.9 Pengendalian penyakit bersumber Binatang
  - 400.7.9.1 Pengendalian malaria
  - 400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis
  - 400.7.9.3 Pengendalian zoonosis
  - 400.7.9.4 Pengendalian filariasis dan kecacingan
- 400.7.10 Pengendalian penyakit tidak menular
  - 400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah

- 400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
- 400.7.10.3 Penyakit kanker
- 400.7.10.4 Penyakit kronis dan generative
- 400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
- 400.7.11 Penyehatan lingkungan
  - 400.7.11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar
  - 400.7.11.2 Pemukiman dan tempat umum
  - 400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat
  - 400.7.11.4 Higien sanitasi pangan
  - 400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi
- 400.7.12 Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
- 400.7.13 Gizi
  - 400.7.13.1 Gizi makro
  - 400.7.13.2 Gizi mikro
  - 400.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik
  - 400.7.13.4 Konsumsi makanan dan jasa makanan
  - 400.7.13.5 Kewaspadaan gizi
- 400.7.14 Kesehatan ibu
  - 400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil
  - 400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas
  - 400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
  - 400.7.14.4 Keluarga berencana
  - 400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi
- 400.7.15 Kesehatan anak
  - 400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi
  - 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
  - 400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko
  - 400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
  - 400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak
- 400.7.16 Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
  - 400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan
  - 400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan
  - 400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer
  - 400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan
- 400.7.17 Kesehatan kerja dan Olah raga
  - 400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja
  - 400.7.17.2 Kapasitas kerja
  - 400.7.17.3 Lingkungan kerja
  - 400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja
  - 400.7.17.5 Kesehatan perkotaan
  - 400.7.17.6 Kesehatan olahraga

- 400.7.18 Obat Publik dan perbekalan kesehatan
  - 400.7.18.1 Harga obat public
  - 400.7.18.2 Pengadaan obat
  - 400.7.18.3 Perbekalan Kesehatan
- 400.7.19 Produksi dan distribusi alat kesehatan
  - 400.7.19.1 Alat Kesehatan
  - 400.7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
  - 400.7.19.3 Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
- 400.7.20 Kefarmasian
  - 400.7.20.1 Pelayanan kefarmasian
  - 400.7.20.2 Farmasi klinis
  - 400.7.20.3 Farmasi Komunitas
  - 400.7.20.4 Penggunaan obat rasional
- 400.7.21 Produksi dan distribusi kefarmasian
  - 400.7.21.1 Obat tradisional
  - 400.7.21.2 Kosmetik dan makanan
  - 400.7.21.3 Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
  - 400.7.21.4 Kemandirian obat dan bahan baku obat
- 400.7.22 Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
  - 400.7.22.1 Surat keterangan
  - 400.7.22.2 Sertifikasi dan perijinan
- 400.7.23 Penanggulangan Krisis Kesehatan
  - 400.7.23.1 Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
  - 400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan
  - 400.7.23.3 Pemantauan dan informasi
  - 400.7.23.4 Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
  - 400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
- 400.7.24 Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
  - 400.7.24.1 Tersedianya data NHA setiap tahun
  - 400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
- 400.7.25 Inteligensia Kesehatan
  - 400.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
  - 400.7.25.2 Penanggulangan masalah inteligensia Kesehatan
- 400.7.26 Kesehatan Haji
  - 400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
  - 400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
- 400.7.27 Promosi Kesehatan
  - 400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan

- 400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
- 400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan
- 400.7.27.4 Hari Kesehatan
- 400.7.28 Data dan Informasi
  - 400.7.28.1 Statistik Kesehatan
  - 400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi
  - 400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
- 400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
  - 400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
  - 400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
  - 400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
  - 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia
- 400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
  - 400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan
  - 400.7.30.2 Standardisasi produk pangan
  - 400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
  - 400.7.30.4 Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
  - 400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya
- 400.7.31 Rekam Medis
- 400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN**
  - 400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 400.8.2 Fasilitasi
    - 400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota
    - 400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
    - 400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
    - 400.8.2.4 Kasus Keagamaan
    - 400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan
  - 400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
    - 400.8.3.1 Kelembagaan dan Kepercayaan
    - 400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
    - 400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
    - 400.8.3.4 Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional
    - 400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
- 400.9 SOSIAL**

- 400.9.1 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak
  - 400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita
  - 400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar
  - 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
  - 400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
  - 400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
- 400.9.3 Rehabilitasi Sosial
  - 400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
  - 400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi sosial
  - 400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
- 400.9.4 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
  - 400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung
  - 400.9.4.2 Tuna susila dan korban trafficking perempuan
  - 400.9.4.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
  - 400.9.4.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
- 400.9.5 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 400.9.6 Pelayanan sosial lanjut usia
  - 400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti
  - 400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
  - 400.9.6.3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
- 400.9.7 Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
- 400.9.8 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
- 400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  - 400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
  - 400.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
  - 400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
  - 400.9.9.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
- 400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - 400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan mitigasi

- 400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
- 400.9.10.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial
- 400.9.10.4 Kerjasama
- 400.9.11 Jaminan Sosial
  - 400.9.11.1 Seleksi dan verifikasi
  - 400.9.11.2 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
  - 400.9.11.3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
  - 400.9.11.4 Kerjasama
- 400.9.12 Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
  - 400.9.12.1 Ketahanan keluarga
  - 400.9.12.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
  - 400.9.12.3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
  - 400.9.12.4 Kemitraan dunia usaha
  - 400.9.12.5 Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
- 400.9.13 Pemberdayaan komunitas adat terpencil
  - 400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan
  - 400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia
  - 400.9.13.3 Penggalian dan pengembangan potensi
  - 400.9.13.4 Keresasian dan penguatan komunitas adat terpencil
  - 400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan
- 400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
  - 400.9.14.1 Identifikasi dan analisis
  - 400.9.14.2 Pengembangan kapasitas
  - 400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh
  - 400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
  - 400.9.14.5 Bantuan Langsung
  - 400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan
- 400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
  - 400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
  - 400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
  - 400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial
  - 400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan
- 400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
  - 400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
    - 400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan



- 400.11.3.2 Pemakaman
- 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
- 400.11.4 Jalur Hijau
  - 400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
  - 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
  - 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
- 400.11.5 Peran Serta Masyarakat
- 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
- 400.11.7 Pengelolaan Data
- 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

**400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

- 400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 400.12.2 Pendaftaran Penduduk
  - 400.12.2.1 Identitas Penduduk
  - 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
  - 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
  - 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
  - 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.3 Pencatatan Sipil
  - 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
  - 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
  - 400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan
  - 400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
  - 400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - 400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
  - 400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
  - 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
  - 400.12.5.2 Kualitas Penduduk
  - 400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
  - 400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
  - 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
- 400.12.6 Penyerasian Kependudukan
  - 400.12.6.1 Indikator Kependudukan
  - 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk

- 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
- 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
- 400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

**400.13 KELUARGA BERENCANA**

- 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
  - 400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
  - 400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
- 400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
  - 400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
  - 400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
- 400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
  - 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
  - 400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
- 400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
  - 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
  - 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
- 400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
  - 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
  - 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
- 400.13.7 Pengembangan Sistem
  - 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
  - 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.8 Pengembangan Materi
  - 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
  - 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
  - 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
  - 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.10 Analisis Sosial
- 400.13.11 Analisis Ekonomi
- 400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
- 400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- 400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
- 400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
- 400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah

- 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
- 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
- 400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
- 400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
- 400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
  - 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
  - 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
- 400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
  - 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
  - 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
- 400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
  - 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
  - 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
- 400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria
  - 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
  - 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
- 400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
- 400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
- 400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
- 400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
  - 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
  - 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
- 400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
  - 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
  - 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
  - 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
  - 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
- 400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
  - 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja

- 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
- 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
  - 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
  - 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
- 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
  - 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
  - 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
  - 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
  - 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
- 400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
- 400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
  - 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
  - 400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
- 400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
- 400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
  - 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
  - 400.13.38.2 Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
  - 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
  - 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
  - 400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
  - 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
- 400.13.41 Advokasi dan pencitraan
- 400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi

- 400.13.42.1 Promosi
- 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
- 400.13.42.3 Produk media komunikasi
- 400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
- 400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
  - 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
  - 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
- 400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
  - 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
  - 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
- 400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
  - 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
  - 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
- 400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
  - 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
  - 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
- 400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan
  - 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
  - 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
- 400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
  - 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
  - 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data
- 400.13.51 Analisis dan evaluasi
  - 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
  - 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data
  - 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
  - 400.13.52.2 Pengelolaan bank data
- 400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi
  - 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
  - 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
  - 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan

400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

**400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT**

- 400.14.1 Keprotokolan
  - 400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
  - 400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan
  - 400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
  - 400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
- 400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat
- 400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media
- 400.14.4 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
  - 400.14.4.1 Kliping koran
  - 400.14.4.2 Brosur/Leaflet/poster/plakat
  - 400.14.4.3 Pengumuman/pemberitaan
- 400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
  - 400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah
  - 400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
  - 400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan
  - 400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)
  - 400.14.5.5 Forum Kehumasan
  - 400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa
- 400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD
- 400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
- 400.14.8 Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal
- 400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
- 400.14.10 Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan
- 400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
- 400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

**500 PEREKONOMIAN**

**500.1 KETAHANAN PANGAN**

- 500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
- 500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
  - 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
  - 500.1.2.2 Akses Pangan

- 500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
  - 500.1.3.1 Distribusi Pangan
  - 500.1.3.2 Harga Pangan
  - 500.1.3.3 Cadangan Pangan
- 500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
  - 500.1.4.1 Konsumsi Pangan
  - 500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
  - 500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
- 500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
  - 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
  - 500.1.5.2 Penghargaan Ketahanan Pangan
- 500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
- 500.1.7 Bimbingan Teknis
- 500.1.8 Evaluasi

**500.2 PERDAGANGAN**

- 500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
  - 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
  - 500.2.2.2 Bina Usaha Jasa Perdagangan
  - 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
  - 500.2.2.4 Informasi Perusahaan
  - 500.2.2.5 Pelaku Pasar
  - 500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
  - 500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
  - 500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
  - 500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
  - 500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi
  - 500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
  - 500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
  - 500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
  - 500.2.2.14 Informasi Pasar
  - 500.2.2.15 Informasi Hasil Industri
  - 500.2.2.16 Barang Strategis
  - 500.2.2.17 Bahan Pokok Agro
- 500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
  - 500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar
  - 500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi
  - 500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar
  - 500.2.3.4 Tata usaha
  - 500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi
  - 500.2.3.6 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
  - 500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha

- 500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan
- 500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka industri
- 500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan
- 500.2.3.11 Jasa
- 500.2.3.12 Kerjasama
- 500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama
- 500.2.3.14 Kelembagaan dan penilaian
- 500.2.3.15 UTTP dan Standar Ukuran
- 500.2.3.16 Pengawasan
- 500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
- 500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP
- 500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 500.2.4.1 Pengkajian pasar
  - 500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
  - 500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
  - 500.2.4.4 Pengkajian pasar
  - 500.2.4.5 Pengembangan Pasar
  - 500.2.4.6 Sistem informasi
  - 500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
  - 500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang
  - 500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang
- 500.2.5 Bimbingan Teknis
- 500.2.6 Evaluasi
- 500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
  - 500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
    - 500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
    - 500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
    - 500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
    - 500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas
  - 500.3.3 Produksi
    - 500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
    - 500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
    - 500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan
    - 500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan
    - 500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
  - 500.3.4 Pembiayaan
    - 500.3.4.1 Program Pendanaan
    - 500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
    - 500.3.4.3 Urusan Permodalan
    - 500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
    - 500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit

- 500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
- 500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
- 500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
- 500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha
  - 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri
  - 500.3.5.2 Ekspor dan Impor
  - 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran
  - 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
  - 500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis
  - 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
- 500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan
  - 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
  - 500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat
  - 500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
  - 500.3.6.5 Advokasi
- 500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
  - 500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
  - 500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha
  - 500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
  - 500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
  - 500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis
- 500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK
  - 500.3.8.1 Penelitian Koperasi
  - 500.3.8.2 Penelitian UKM
  - 500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya
  - 500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK
- 500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
- 500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
  - 500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
  - 500.3.10.2 Sarana dan Prasarana
- 500.3.11 Monitoring dan Evaluasi
- 500.4 KEHUTANAN**
  - 500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.4.2 Penyuluhan
    - 500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
    - 500.4.2.2 Materi Penyuluhan
    - 500.4.2.3 Program Penyuluhan
    - 500.4.2.4 Sarana Penyuluhan
    - 500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
    - 500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
    - 500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
    - 500.4.2.8 Deseminasi

- 500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan
- 500.4.3 Planologi Kehutanan
  - 500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
  - 500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan
  - 500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
  - 500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
  - 500.4.3.5 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
  - 500.4.3.6 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
  - 500.4.3.7 Inventarisasi Sumber Daya Hutan
  - 500.4.3.8 Pemantauan Sumber Daya Hutan
  - 500.4.3.9 Pemetaan Sumber Daya Hutan
  - 500.4.3.10 Jaringan Data Spasial
  - 500.4.3.11 Penggunaan Kawasan Hutan
  - 500.4.3.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
  - 500.4.3.13 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
  - 500.4.3.14 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
  - 500.4.3.15 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
  - 500.4.3.16 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
- 500.4.4 Bina Usaha Kehutanan
  - 500.4.4.1 Data areal HPH /HTI/IUPHHK
  - 500.4.4.2 SK HPH/HTI/IUPHHK
  - 500.4.4.3 Kerjasama
  - 500.4.4.4 Pembatalan/Penolakan
  - 500.4.4.5 Perpanjangan
  - 500.4.4.6 Modal dan Peralatan
  - 500.4.4.7 Investasi Industri
  - 500.4.4.8 Peralatan
  - 500.4.4.9 Tenaga Kerja
  - 500.4.4.10 Pemegang Saham
  - 500.4.4.11 Neraca Perusahaan
  - 500.4.4.12 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
  - 500.4.4.13 Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
  - 500.4.4.14 Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
  - 500.4.4.15 Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
  - 500.4.4.16 Target Produksi RKT dan Beban Kerja
  - 500.4.4.17 Produksi Kayu
  - 500.4.4.18 Produksi non kayu
  - 500.4.4.19 Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
  - 500.4.4.20 Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK

- 500.4.4.21 Industri Non Kayu
- 500.4.4.22 Hutan Tanaman Industri Pulp
- 500.4.4.23 Hutan Tanaman Industri Pertukangan
- 500.4.4.24 Pelanggaran dan Sanksi
- 500.4.4.25 Pemblokiran
- 500.4.4.26 Denda
- 500.4.4.27 Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
- 500.4.4.28 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
- 500.4.4.29 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
- 500.4.4.30 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
- 500.4.4.31 Pengembangan Investasi Usaha
- 500.4.4.32 Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
- 500.4.4.33 Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
- 500.4.4.34 Produksi Hutan Alam
- 500.4.4.35 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
- 500.4.4.36 Pengembangan Hutan Tanaman Industri
- 500.4.4.37 Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
- 500.4.4.38 Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
- 500.4.4.39 Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
- 500.4.4.40 Pembiayaan Hutan Tanaman
- 500.4.4.41 Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
- 500.4.4.42 Peredaran Hasil Hutan
- 500.4.4.43 Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
- 500.4.4.44 Penertiban Peredaran Hasil Hutan
- 500.4.4.45 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
- 500.4.4.46 Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
- 500.4.4.47 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
- 500.4.4.48 Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
- 500.4.4.49 Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
- 500.4.5 Standardisasi dan Lingkungan
  - 500.4.5.1 Standardisasi
  - 500.4.5.2 Sarana Pengujian Hasil Hutan
  - 500.4.5.3 Pengembangan
  - 500.4.5.4 Pemasaran Hasil Hutan
  - 500.4.5.5 Pengendalian Lingkungan
  - 500.4.5.6 Angkutan Hasil Hutan
  - 500.4.5.7 Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
  - 500.4.5.8 Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
  - 500.4.5.9 Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan

- 500.4.5.10 Pass Angkutan Hasil Hutan
- 500.4.5.11 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
- 500.4.6 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
  - 500.4.6.1 Flora dan Fauna yang Dilindungi
  - 500.4.6.2 Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
  - 500.4.6.3 Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
  - 500.4.6.4 Konvensi Keanekaragaman Hayati
  - 500.4.6.5 Kawasan Konservasi
  - 500.4.6.6 Pengamanan Hutan
  - 500.4.6.7 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
  - 500.4.6.8 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
  - 500.4.6.9 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
  - 500.4.6.10 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
  - 500.4.6.11 Bina Cinta Alam
  - 500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
  - 500.4.6.13 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
- 500.4.7 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
  - 500.4.7.1 Pengelolaan Benih
  - 500.4.7.2 Kebun Benih
  - 500.4.7.3 Tegakan Benih
  - 500.4.7.4 Pengadaan Benih
  - 500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih
  - 500.4.7.6 Lalu Lintas Angkutan Benih
  - 500.4.7.7 Pembibitan
  - 500.4.7.8 Lalu Lintas Angkutan Benih
  - 500.4.7.9 Pengembangan Usaha Perbenihan
  - 500.4.7.10 Pengendalian Peredaran Benih
  - 500.4.7.11 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - 500.4.7.12 Tanaman Reboisasi
  - 500.4.7.13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
  - 500.4.7.14 Perhutanan Sosial
  - 500.4.7.15 Pengendalian Perladangan
- 500.4.8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
  - 500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
  - 500.4.8.2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian
  - 500.4.8.3 Diseminasi
  - 500.4.8.4 Gelar Teknologi
  - 500.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

**500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- 500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.5.2 Perikanan Tangkap
  - 500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap
  - 500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
  - 500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
  - 500.5.2.4 Pendaftaran Kapal Perikanan
  - 500.5.2.5 Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
  - 500.5.2.6 Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
  - 500.5.2.7 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
  - 500.5.2.8 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
  - 500.5.2.9 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
  - 500.5.2.10 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
  - 500.5.2.11 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
  - 500.5.2.12 Kelembgaan Usaha Penangkapan
  - 500.5.2.13 Investasi dan Permodalan Usaha
  - 500.5.2.14 Kenelayanan
  - 500.5.2.15 Pembinaan Pengelolaan Usaha
  - 500.5.2.16 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
- 500.5.3 Perikanan Budidaya
  - 500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air
  - 500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
  - 500.5.3.3 Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
  - 500.5.3.4 Perbenihan Skala Kecil
  - 500.5.3.5 Informasi dan Distribusi Pembenihan
  - 500.5.3.6 Budidaya Air Tawar
  - 500.5.3.7 Budidaya Ikan Hias
  - 500.5.3.8 Sertifikasi Budidaya Perikanan
  - 500.5.3.9 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
  - 500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan
  - 500.5.3.11 Perlindungan Lingkungan Budidaya
  - 500.5.3.12 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
  - 500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya
  - 500.5.3.14 Pelayanan Usaha Budidaya
  - 500.5.3.15 Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
  - 500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budaya
- 500.5.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - 500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil
  - 500.5.4.2 Pengembangan Produk

- 500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 500.5.4.4 Industri Pengolahan
- 500.5.4.5 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
- 500.5.4.6 Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
- 500.5.4.7 Promosi dan Jaringan Ikan Hias
- 500.5.4.8 Pengembangan Industri
- 500.5.4.9 Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
- 500.5.4.10 Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
- 500.5.4.11 Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
- 500.5.4.12 Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
- 500.5.4.13 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
- 500.5.4.14 Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
- 500.5.4.15 Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
- 500.5.4.16 Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
- 500.5.4.17 Pengembangan Ekspor
- 500.5.4.18 Pengembangan Impor
- 500.5.4.19 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
- 500.5.4.20 Pelayanan Usaha
- 500.5.4.21 Kemitraan Usaha
- 500.5.4.22 Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
- 500.5.4.23 Investasi dan Permodalan
- 500.5.4.24 Informasi dan Promosi
- 500.5.5 Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
  - 500.5.5.1 Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
  - 500.5.5.2 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
  - 500.5.5.3 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
  - 500.5.5.4 Informasi dan Evaluasi Spasial
  - 500.5.5.5 Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
  - 500.5.5.6 Konservasi Wawasan
  - 500.5.5.7 Konservasi Jenis Ikan
  - 500.5.5.8 Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
  - 500.5.5.9 Mitigasi Bencana Lingkungan
  - 500.5.5.10 Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
  - 500.5.5.11 Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
  - 500.5.5.12 Rehabilitasi dan Reklamasi
  - 500.5.5.13 Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
  - 500.5.5.14 Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil

- 500.5.5.15 Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
- 500.5.5.16 Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
- 500.5.5.17 Akses Permodalan
- 500.5.5.18 Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 500.5.5.19 Sosial Budaya Masyarakat
- 500.5.5.20 Pengembangan Usaha
- 500.5.6 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
  - 500.5.6.1 Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
  - 500.5.6.2 Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
  - 500.5.6.3 Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
  - 500.5.6.4 Pengawasan Usaha Budidaya
  - 500.5.6.5 Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
  - 500.5.6.6 Pengawasan Pencemaran Perairan
  - 500.5.6.7 Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
  - 500.5.6.8 Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
  - 500.5.6.9 Logistik dan Operasional Wilayah Barat
  - 500.5.6.10 Logistik dan Operasional Wilayah Timur
  - 500.5.6.11 Perawatan Kapal Pengawas
  - 500.5.6.12 Pengawasan Kapal Pengawas
  - 500.5.6.13 Sistem Pemantauan
  - 500.5.6.14 Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
  - 500.5.6.15 Pemantauan Sumber Daya Perikanan
  - 500.5.6.16 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
  - 500.5.6.17 Penyidikan
  - 500.5.6.18 Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
  - 500.5.6.19 Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
  - 500.5.6.20 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
- 500.5.7 Karantina Ikan
  - 500.5.7.1 Pemeriksaan Ikan
  - 500.5.7.2 Penahanan
  - 500.5.7.3 Pengasingan
  - 500.5.7.4 Pengamatan
  - 500.5.7.5 Pengakuan
  - 500.5.7.6 Penolakan
  - 500.5.7.7 Pemusnahan
  - 500.5.7.8 Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
  - 500.5.7.9 Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
  - 500.5.7.10 Permohonan Sertifikat
  - 500.5.7.11 Pemasukan Formulir

- 500.5.7.12 Pemasukan Sertifikat
- 500.5.7.13 Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
- 500.5.7.14 Surat Perintah
- 500.5.7.15 Rekomendasi
- 500.5.7.16 Penutupan Suatu Area
- 500.5.7.17 Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
- 500.5.7.18 Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
- 500.5.7.19 Pengawasan Pelaksanaan Operasional
- 500.5.7.20 Instalasi Karantina Sementara
- 500.5.7.21 Lokasi Karantina

**500.6 PERTANIAN**

- 500.6.1 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.6.2 Perlindungan hortikultura
  - 500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah
  - 500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
  - 500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura
  - 500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
- 500.6.3 Perbenihan Hortikultura
  - 500.6.3.1 Penilaian Varietas
  - 500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih
  - 500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura
- 500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan
  - 500.6.4.1 Basis Data Lahan
  - 500.6.4.2 Pengendalian Lahan
  - 500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
  - 500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
  - 500.6.4.5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
- 500.6.5 Pengelolaan Air Irigasi
  - 500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air
  - 500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
  - 500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
  - 500.6.5.4 Kelembagaan
- 500.6.6 Pembiayaan Pertanian
  - 500.6.6.1 Pembiayaan Program
  - 500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
  - 500.6.6.3 Pembiayaan agribisnis
  - 500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
- 500.6.7 Pupuk Pestisida
  - 500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
  - 500.6.7.2 Pupuk Anorganik
  - 500.6.7.3 Pestisida
  - 500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida

- 500.6.8      Alat dan Mesin Pertanian
  - 500.6.8.1      Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
  - 500.6.8.2      Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
  - 500.6.8.3      Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
- 500.6.9      Perbenihan Tanaman Pangan
  - 500.6.9.1      Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
  - 500.6.9.2      Produksi Benih Serealia
  - 500.6.9.3      Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
  - 500.6.9.4      Kelembagaan Benih
- 500.6.10     Budidaya Serealia
  - 500.6.10.1    Padi Irigasi dan Rawa
  - 500.6.10.2    Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
  - 500.6.10.3    Jagung
  - 500.6.10.4    Serealia Lain
- 500.6.11     Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
  - 500.6.11.1    Kedelai
  - 500.6.11.2    Ubi Kayu
  - 500.6.11.3    Aneka Kacang
  - 500.6.11.4    Aneka Umbi
- 500.6.12     Tanaman Pangan
  - 500.6.12.1    Pengeloaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
  - 500.6.12.2    Dampak Perubahan Iklim
  - 500.6.12.3    Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
  - 500.6.12.4    Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
- 500.6.13     Pascapanen Tanaman Pangan
  - 500.6.13.1    Padi
  - 500.6.13.2    Jagung dan Serealia alin
  - 500.6.13.3    Kedelai dan Aneka Kacang
  - 500.6.13.4    Aneka Umbi
- 500.6.14     Pengolahan Hasil Pertanian
  - 500.6.14.1    Tanaman Pangan
  - 500.6.14.2    Holtikultura
  - 500.6.14.3    Perkebunan
  - 500.6.14.4    Peternakan
- 500.6.15     Mutu dan Standarasi
  - 500.6.15.1    Standardisasi
  - 500.6.15.2    Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
  - 500.6.15.3    Akreditasi dan Kelembagaan
  - 500.6.15.4    Kerjasama dan Harmonisasi
- 500.6.16     Pengembangan Usaha dan Investasi
  - 500.6.16.1    Kemitraan dan Kewirausahaan
  - 500.6.16.2    Investasi
  - 500.6.16.3    Promosi Dalam Negeri

- 500.6.16.4 Promosi Luar Negeri
- 500.6.17 Pemasaran Domestik
  - 500.6.17.1 Informasi Pasar
  - 500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
  - 500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar
  - 500.6.17.4 Jaringan Pemasaran
- 500.6.18 Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat
- 500.6.19 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
  - 500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan
  - 500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
- 500.6.20 Diseminasi
- 500.6.21 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
  - 500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
  - 500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
- 500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
- 500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
- 500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan
- 500.6.25 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
- 500.6.26 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
  - 500.6.26.1 Hak Cipta
  - 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
  - 500.6.26.3 Hak Paten Biasa
  - 500.6.26.4 Hak Merek
  - 500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
  - 500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
  - 500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
- 500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
  - 500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
  - 500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
  - 500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
- 500.6.28 Pelayanan Hukum
  - 500.6.28.1 Sertifikasi
  - 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
- 500.6.29 Karantina Pertanian
  - 500.6.29.1 Karantina Tumbuhan

- 500.6.29.2 Karantina Hewan
- 500.6.30 Bimbingan Teknis
- 500.6.31 Evaluasi

**500.7 PETERNAKAN**

- 500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 500.7.2.1 Perbibitan Ternak, antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran Pakan Ternak
  - 500.7.2.2 Budidaya Ternak
  - 500.7.2.3 Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
  - 500.7.2.4 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
- 500.7.3 Bimbingan Teknis
- 500.7.4 Evaluasi

**500.8 PERKEBUNAN**

- 500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.8.2 Tanaman Semusim
  - 500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
  - 500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim
  - 500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
  - 500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim
- 500.8.3 Tanaman Rempah dan Penyegar
  - 500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar
  - 500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar
  - 500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar
  - 500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar

- 500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
- 500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan
- 500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan
- 500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
- 500.8.5 Perlindungan Perkebunan
  - 500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
  - 500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
  - 500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
  - 500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
- 500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha
  - 500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
  - 500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan
  - 500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
  - 500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
- 500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan
- 500.8.8 Evaluasi Perkebunan
- 500.9 PERINDUSTRIAN**
  - 500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama
    - 500.9.2.1 Industri Manufaktur
    - 500.9.2.2 Industri Agro
    - 500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
    - 500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah
  - 500.9.3 Promosi Industri
    - 500.9.3.1 Industri Manufaktur
    - 500.9.3.2 Promosi Industri Agro
    - 500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
    - 500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah
  - 500.9.4 Standarisasi dan Teknologi
    - 500.9.4.1 Industri Manufaktur
    - 500.9.4.2 Industri Agro
    - 500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
    - 500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah
  - 500.9.5 Hak atas Kekayaan Intelektual

- 500.9.5.1 Industri Manufaktur
  - 500.9.5.2 Industri Agro
  - 500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
  - 500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah
  - 500.9.6 Industri Hijau
    - 500.9.6.1 Industri Manufaktur
    - 500.9.6.2 Industri Agro
    - 500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
    - 500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah
  - 500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
  - 500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
  - 500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
  - 500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
  - 500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
  - 500.9.12 Standarisasi
    - 500.9.12.1 Standar
    - 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
    - 500.9.12.3 Infrastruktur Standar
  - 500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
    - 500.9.13.1 Kebijakan Industri
    - 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
    - 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial
  - 500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
    - 500.9.14.1 Industri Hijau
    - 500.9.14.2 Lingkungan Hidup
    - 500.9.14.3 Energi
  - 500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
    - 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
    - 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
    - 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
  - 500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
- 500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
- 500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
    - 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
    - 500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
    - 500.10.2.3 Pertambangan
    - 500.10.2.4 Panas Bumi
    - 500.10.2.5 Geosains

- 500.10.2.6 Pengukuran Time Domain  
Electromagnetic (TDEM)
- 500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan
- 500.10.3 Penelitian Kegeologian
  - 500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian
  - 500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian
  - 500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian
  - 500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
  - 500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
  - 500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
  - 500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
  - 500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
  - 500.10.3.9 Survei Geologi
- 500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
  - 500.10.4.1 Sumber Daya Geologi
  - 500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
  - 500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
  - 500.10.4.4 Survei Geologi
  - 500.10.4.5 Konservasi
- 500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
  - 500.10.5.1 Peta potensi dan sebaran
  - 500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
  - 500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
  - 500.10.5.4 Survei Geologi
- 500.10.6 Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
  - 500.10.6.1 Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
  - 500.10.6.2 Rencana dan Realisasi Investasi
  - 500.10.6.3 Penetapan Harga Minyak Mentah
  - 500.10.6.4 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
  - 500.10.6.5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
  - 500.10.6.6 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
  - 500.10.6.7 Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
  - 500.10.6.8 Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
- 500.10.7 Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
  - 500.10.7.1 Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)

- 500.10.7.2 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan
- 500.10.7.3 Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/ Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi
- 500.10.7.4 Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
- 500.10.7.5 Perpanjangan Kontrak KKS
- 500.10.7.6 Penetapan Alokasi dan Harga Gas
- 500.10.7.7 Partisipasi Interest
- 500.10.7.8 Tumpang Tindih Lahan
- 500.10.8 Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
  - 500.10.8.1 Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan
  - 500.10.8.2 Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
  - 500.10.8.3 Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
- 500.10.9 Teknik dan Lingkungan
  - 500.10.9.1 Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

- 500.10.9.2 Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
- 500.10.9.3 Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
- 500.10.9.4 Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
- 500.10.9.5 Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
- 500.10.9.6 Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
- 500.10.9.7 Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
- 500.10.9.8 Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
- 500.10.9.9 Penghargaan Keselamatan Kerja, antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
- 500.10.9.10 Usaha penunjang
- 500.10.10 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
  - 500.10.10.1 Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
  - 500.10.10.2 Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
  - 500.10.10.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
  - 500.10.10.4 Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- 500.10.11 Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
  - 500.10.11.1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi

- 500.10.11.2 Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
- 500.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
- 500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
- 500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
- 500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi
- 500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT
- 500.10.12 Panas Bumi
  - 500.10.12.1 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
  - 500.10.12.2 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
  - 500.10.12.3 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
  - 500.10.12.4 Rekomendasi Bahan Peledak
  - 500.10.12.5 Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
  - 500.10.12.6 Izin Tangki Bahan Bakar Cair
  - 500.10.12.7 Persetujuan sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
  - 500.10.12.8 Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
  - 500.10.12.9 Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
  - 500.10.12.10 Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
  - 500.10.12.11 Penetapan kapasitas usaha panas bumi
  - 500.10.12.12 Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
  - 500.10.12.13 Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
  - 500.10.12.14 Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
  - 500.10.12.15 Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitas Bidang Panas Bumi
  - 500.10.12.16 Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
  - 500.10.12.17 Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
- 500.10.13 Bioenergi
  - 500.10.13.1 Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
  - 500.10.13.2 Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
  - 500.10.13.3 Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
  - 500.10.13.4 Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
  - 500.10.13.5 Evaluasi/Revisi HIP BBN
  - 500.10.13.6 Database Pengusahaan Bioenergi

- 500.10.13.7 Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
- 500.10.13.8 Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
- 500.10.13.9 Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
- 500.10.14 Aneka Energi
  - 500.10.14.1 Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
  - 500.10.14.2 Penetapan Kapasitas Usaha
  - 500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  - 500.10.14.4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
  - 500.10.14.5 Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
- 500.10.15 Konservasi Energi
  - 500.10.15.1 Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
  - 500.10.15.2 Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
  - 500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
  - 500.10.15.4 Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
  - 500.10.15.5 Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
  - 500.10.15.6 Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
  - 500.10.15.7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
  - 500.10.15.8 Profil investasi efisiensi energi
  - 500.10.15.9 Investment Grade Audit (IGA)
  - 500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
- 500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
  - 500.10.16.1 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
  - 500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
  - 500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
  - 500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja
- 500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik
  - 500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik, antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik

- 500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan, antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
- 500.10.17.3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan
- 500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistrikan
  - 500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, antara lain: Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IU, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data Laporan Berkala Pemegang Izin
  - 500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik
  - 500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik
  - 500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik, antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
- 500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
  - 500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
  - 500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
  - 500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
  - 500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi *Clean Development Mechansim (CDM)*
- 500.10.20 Sertifikasi
  - 500.10.20.1 Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
  - 500.10.20.2 Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)

- 500.10.20.3 Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
- 500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
- 500.10.20.5 Registrasi Sertifikasi
- 500.10.21 Akreditasi Ketenagalistrikan
- 500.10.22 Standarisasi Kompetensi
- 500.10.23 Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
  - 500.10.23.1 Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
  - 500.10.23.2 Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
  - 500.10.23.3 Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
  - 500.10.23.4 Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
- 500.10.24 Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
  - 500.10.24.1 Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
  - 500.10.24.2 Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
  - 500.10.24.3 Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
  - 500.10.24.4 Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
  - 500.10.24.5 Laporan hasil pengawasan penunjukan
- 500.10.25 Bina Program Mineral dan Batubara
  - 500.10.25.1 Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
  - 500.10.25.2 Rencana Induk Mineral dan Batubara
  - 500.10.25.3 Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
  - 500.10.25.4 Data dan Informasai Mineral dan Batubara
  - 500.10.25.5 Pelaporan Program Mineral dan Batubara
  - 500.10.25.6 Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
  - 500.10.25.7 Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
  - 500.10.25.8 Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
  - 500.10.25.9 Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
- 500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral
  - 500.10.26.1 Ketenagakerjaan
  - 500.10.26.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
  - 500.10.26.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral

- 500.10.26.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
- 500.10.26.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
- 500.10.26.6 Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
- 500.10.26.7 Perizinan usaha pertambangan mineral
- 500.10.26.8 Kontrak Karya (KK)
- 500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
- 500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
- 500.10.26.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
- 500.10.26.12 Teguran kepada pengusaha Kontrak Karya (KK)
- 500.10.26.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
- 500.10.26.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
- 500.10.26.15 Pelaporan usaha pertambangan mineral
- 500.10.26.16 Penghargaan usaha pertambangan mineral
- 500.10.26.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
- 500.10.27 Pembinaan Pengusahaan Batubara
  - 500.10.27.1 Ketenagakerjaan
  - 500.10.27.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
  - 500.10.27.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
  - 500.10.27.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
  - 500.10.27.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
  - 500.10.27.6 Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
  - 500.10.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
  - 500.10.27.8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
  - 500.10.27.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara
  - 500.10.27.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)

- 500.10.27.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
- 500.10.27.12 Teguran kepada pengusaha Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
- 500.10.27.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
- 500.10.27.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
- 500.10.27.15 Pelaporan usaha pertambangan batubara
- 500.10.27.16 Penghargaan usaha pertambangan batubara
- 500.10.27.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
- 500.10.28 Penerimaan Negara
  - 500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak
  - 500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  - 500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
- 500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
  - 500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
  - 500.10.29.2 Pengawasan Standardisasi
  - 500.10.29.3 Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
  - 500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  - 500.10.29.5 Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi
  - 500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
  - 500.10.29.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
  - 500.10.29.8 Rekomendasi bahan kimia

- 500.10.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
- 500.10.29.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi, antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi
- 500.10.29.11 Pemberian Penghargaan, antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
- 500.10.29.12 Pengawasan lingkungan pertambangan
- 500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara
- 500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
- 500.10.29.15 Rekomendasi Teknis, antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis
- 500.10.29.16 Persetujuan Teknis, antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis
- 500.10.29.17 Pengawasan Teknis
- 500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
- 500.10.29.19 Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan
- 500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan
  - 500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan
  - 500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi
  - 500.10.30.3 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi
  - 500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian pengembangan dan inovasi

- 500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.6 Pembinaan penelitian /Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.8 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.9 *Master proceeding/* jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.10 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
- 500.10.30.11 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.12 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
- 500.10.30.13 Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
- 500.10.31 Sarana Litbang
  - 500.10.31.1 Administrasi penggunaan peralatan
  - 500.10.31.2 *Log-book* Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
- 500.10.32 Afiliasi
  - 500.10.32.1 Proyek Percontohan
  - 500.10.32.2 Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
  - 500.10.32.3 Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
  - 500.10.32.4 Penyajian Informasi
- 500.10.33 Penelitian dan Pengembangan Kegeologian
  - 500.10.33.1 Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
  - 500.10.33.2 Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
  - 500.10.33.3 Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
  - 500.10.33.4 Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
- 500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
  - 500.10.34.1 Teknologi Eksplorasi
  - 500.10.34.2 Teknologi Eksploitasi
  - 500.10.34.3 Laboratorium
  - 500.10.34.4 Study
  - 500.10.34.5 Teknologi Proses
  - 500.10.34.6 Teknologi Aplikasi Produk
  - 500.10.34.7 Teknologi Gas

- 500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara
  - 500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
  - 500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
  - 500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara
- 500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
  - 500.10.36.1 Energi baru terbarukan
  - 500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan
  - 500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi
  - 500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

**500.11 PERHUBUNGAN**

- 500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
  - 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
  - 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
  - 500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
  - 500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
  - 500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
  - 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
  - 500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
  - 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
  - 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder
- 500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
  - 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
  - 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan
- 500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
  - 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
  - 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
  - 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
  - 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
- 500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
  - 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor

- 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
- 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
- 500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
- 500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  - 500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
  - 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
- 500.11.7 Perlengkapan Jalan
  - 500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan
  - 500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
  - 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
  - 500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
  - 500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
- 500.11.8 Angkutan Penumpang
  - 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
  - 500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
  - 500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi
  - 500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
  - 500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
  - 500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum
  - 500.11.8.7 Angkutan perintis
  - 500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum
- 500.11.9 Angkutan Barang
  - 500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
  - 500.11.9.2 Tarif angkutan barang
  - 500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu
  - 500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang
  - 500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan
- 500.11.10 Monitoring Operasional
  - 500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
  - 500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda

- 500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  - 500.11.11.1 Pedoman Teknis
  - 500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
  - 500.11.11.3 Bimtek PPNS
  - 500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
  - 500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
  - 500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
- 500.11.13 Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
  - 500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
  - 500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- 500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
  - 500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
  - 500.11.15.2 Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
- 500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
  - 500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan, danau dan penyeberangan
  - 500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
  - 500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
  - 500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

- 500.11.18.1 Manajemen lalu lintas
- 500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
- 500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
- 500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
  - 500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
  - 500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
  - 500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
  - 500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
  - 500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
- 500.11.21 Tarif dan Keperintisan
  - 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
  - 500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
- 500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan
  - 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan
  - 500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
  - 500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
  - 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
  - 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
  - 500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
- 500.11.24 Angkutan Perkotaan
  - 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
  - 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
  - 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

- 500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
  - 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
  - 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
  - 500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan
  - 500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
  - 500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
  - 500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
  - 500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
  - 500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
  - 500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan
- 500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
  - 500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
  - 500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian
  - 500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.28 Pengembangan Keselamatan
  - 500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
  - 500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan
- 500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan
  - 500.11.29.1 Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
  - 500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum
  - 500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum

- 500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
- 500.11.31 Audit Keselamatan
  - 500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
  - 500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
  - 500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
- 500.11.32 Inspeksi Keselamatan
  - 500.11.32.1 Pedoman keselamatan
  - 500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
  - 500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
- 500.11.33 Parkir
  - 500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir
  - 500.11.33.2 Izin tempat khusus parkir swasta
  - 500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah
- 500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
  - 500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.12.2 Telekomunikasi
    - 500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi
    - 500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi
    - 500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
    - 500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi
  - 500.12.3 Penyiaran
    - 500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
    - 500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
  - 500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
    - 500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
    - 500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
    - 500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran
    - 500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal
    - 500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur
  - 500.12.5 Pengendalian Informatika
    - 500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi

- 500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
- 500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
- 500.12.5.4 Pencegahan dan Penertiban
- 500.12.6 *e- Government*
  - 500.12.6.1 Tata Kelola *e-Government*
  - 500.12.6.2 Teknologi dan Infrastruktur *e-Government*
  - 500.12.6.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas *e-Government*
  - 500.12.6.4 Aplikasi Layanan Kepemerintahan
  - 500.12.6.5 Aplikasi Layanan Publik
- 500.12.7 *e- Business*
  - 500.12.7.1 Tata Kelola *e-Business*
  - 500.12.7.2 Teknologi dan Infrastruktur *e-Business*
  - 500.12.7.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas *e-Business*
  - 500.12.7.4 Aplikasi Layanan *e-Business*
- 500.12.8 Pemberdayaan Informatika Masyarakat
  - 500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
  - 500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
- 500.12.9 Pemberdayaan Industri Informatika
  - 500.12.9.1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
  - 500.12.9.2 Industri Perangkat Informatika Pengguna
  - 500.12.9.3 Industri Perangkat Lunak
  - 500.12.9.4 Industri Konten Multimedia
- 500.12.10 Keamanan Informasi
  - 500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Informasi
  - 500.12.10.2 Teknologi Keamanan Informasi
  - 500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
  - 500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan
  - 500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi
- 500.12.11 Komunikasi Publik
  - 500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik
  - 500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik
  - 500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik
- 500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi
  - 500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
  - 500.12.12.2 Informasi Perekonomian
  - 500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat
- 500.12.13 Pengelolaan Media Publik
  - 500.12.13.1 Media Cetak
  - 500.12.13.2 Media Online
  - 500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
- 500.12.14 Kemitraan Komunikasi
  - 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
  - 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha

- 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
- 500.12.15 Infrastruktur Informatika
  - 500.12.15.1 Jaringan
  - 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
  - 500.12.15.3 Keamanan Informatika
- 500.12.16 Sistem dan Data
  - 500.12.16.1 Portal dan Konten
  - 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
  - 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
- 500.12.17 Pusat Kerjasama
  - 500.12.17.1 Kerja Sama daerah
  - 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
- 500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
  - 500.12.18.1 Pelayanan Informasi
  - 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
  - 500.12.18.3 Bimbingan Teknis
- 500.12.19 Evaluasi

**500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

- 500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
  - 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
  - 500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata
  - 500.13.2.3 Industri Pariwisata
  - 500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
  - 500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
- 500.13.3 Pemasaran Pariwisata
  - 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
  - 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri
  - 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
  - 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia
- 500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
  - 500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman
  - 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
  - 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa
- 500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
  - 500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
  - 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur
  - 500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi
- 500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - 500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata

- 500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
  - 500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - 500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 500.14 STATISTIK**
- 500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
    - 500.14.2.1 Perencanaan
    - 500.14.2.2 Persiapan, antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
    - 500.14.2.3 Pelaksanaan Lapangan
    - 500.14.2.4 Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ *Batching*), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (*Editing/Coding*), Perekaman data (*entri, scanner*), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
    - 500.14.2.5 Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
    - 500.14.2.6 Diseminasi hasil sensus
  - 500.14.3 Survei
    - 500.14.3.1 Perencanaan
    - 500.14.3.2 Persiapan
    - 500.14.3.3 Pelaksanaan Lapangan, antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas

- 500.14.3.4 Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/ *Batching*), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (*Editing/Coding*), Perekaman data (*entri, scanner*), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
- 500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi
- 500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei
- 500.14.4 Konsolidasi Data Statistik
  - 500.14.4.1 Kompilasi Data
  - 500.14.4.2 Analisis data
  - 500.14.4.3 Penyusunan Publikasi
  - 500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
- 500.15 KETENAGAKERJAAN**
  - 500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja
    - 500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
    - 500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
  - 500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
    - 500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi
    - 500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
    - 500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
    - 500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
    - 500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
  - 500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
    - 500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
    - 500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
    - 500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
    - 500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
  - 500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
    - 500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
    - 500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
    - 500.15.5.3 Tenaga Pelatihan

- 500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
- 500.15.6 Bina Pemagangan
  - 500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri
  - 500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
  - 500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan
  - 500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan
- 500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan
  - 500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
  - 500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
  - 500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
  - 500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan
- 500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja
  - 500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja
  - 500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
  - 500.15.8.3 Bursa Kerja
  - 500.15.8.4 Analisis Jabatan
- 500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
  - 500.15.9.1 Antar Kerja
  - 500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus
  - 500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
  - 500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja
- 500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
  - 500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
  - 500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
  - 500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
  - 500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
- 500.15.11 Standardisasi Profesi
  - 500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi
  - 500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi
- 500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
  - 500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
  - 500.15.12.2 Perjanjian Kerja
  - 500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja
  - 500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
- 500.15.13 Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial
  - 500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
  - 500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial
  - 500.15.13.3 Pemasarakatan Hubungan Industrial
- 500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  - 500.15.14.1 Pengupahan

- 500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
- 500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
  - 500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
  - 500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  - 500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - 500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja
  - 500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
  - 500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
- 500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
  - 500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
  - 500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
  - 500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektor
  - 500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
- 500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
  - 500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
  - 500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
  - 500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
  - 500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
- 500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
- 500.15.20 Bina Penegakan Hukum
  - 500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
  - 500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
  - 500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  - 500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum
- 500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  - 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3
  - 500.15.21.2 Hasil kajian, perancangan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
  - 500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
  - 500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3

- 500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
  - 500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
  - 500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
  - 500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
  - 500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
  - 500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
  - 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
  
- 500.16 PENANAMAN MODAL**
  - 500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
    - 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
    - 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
    - 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
    - 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
  - 500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
    - 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
    - 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
    - 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
    - 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
    - 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
    - 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
  - 500.16.4 Promosi Penanaman Modal
    - 500.16.4.1 Pengembangan Promosi
    - 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
    - 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
    - 500.16.4.4 Promosi Sektoral
    - 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
    - 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi
  - 500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
    - 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
    - 500.16.5.2 Kerja Sama Regional
    - 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
  - 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
    - 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
    - 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
    - 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
    - 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
    - 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal

	500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Penanaman Modal	Perizinan
500.16.7		Pelayanan Penanaman Modal	
	500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi	
	500.16.7.2	Pelayanan Perijinan	
	500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan	
	500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan	
	500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas	
<b>500.17</b>	<b>PERTANAHAN</b>		
500.17.1		Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.17.2		Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan	
	500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	
	500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	
	500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan	
	500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian	
500.17.3		Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah	
	500.17.3.1	Penatagunaan Tanah	
	500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik	
	500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah	
500.17.4		Sengketa Tanah	
	500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	
	500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian	
<b>500.18</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>		
500.18.1		Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.18.2		Penyediaan Tanah Transmigrasi	
	500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	
	500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah	
	500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan	
	500.18.2.4	Advokasi Pertanahan	
500.18.3		Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	
	500.18.3.1	Penyiapan Lahan	
	500.18.3.2	Penyiapan Sarana	
	500.18.3.3	Penyiapan Prasarana	
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman	
500.18.4		Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	
	500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi	
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan	
	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan	
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi	
500.18.5		Partisipasi Masyarakat	
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi	
	500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan	

- 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
- 500.18.5.4 Pelayanan Investasi
  
- 500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
  - 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
  - 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
  - 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
  - 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
  - 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
  
- 500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
  - 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
  - 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
  - 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
  - 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
  
- 500.18.8 Pengembangan Usaha
  - 500.18.8.1 Kewirausahaan
  - 500.18.8.2 Produksi
  - 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
  - 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
  
- 500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
  - 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
  - 500.18.9.2 Pengembangan Sarana
  - 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
  - 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
  
- 500.18.10 Penyerasian Lingkungan
  - 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
  - 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
  - 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
  - 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

**600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN**

**600.1 PEKERJAAN UMUM**

**600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

**600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)**

- 600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
- 600.3.2 Perencanaan
  - 600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
  - 600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
  - 600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
  - 600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
  - 600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
  - 600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota
  - 600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota/ Prasarana Kota
- 600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian
  - 600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
  - 600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang
  - 600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
- 600.3.4 Pemetaan
  - 600.3.4.1 Peta Dasar
  - 600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat
  - 600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air
  - 600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara

**600.4 LINGKUNGAN HIDUP**

- 600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  - 600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
  - 600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- 600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
  - 600.4.3.1 Evaluasi Penerapan
  - 600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup
- 600.4.4 Ekonomi Lingkungan
- 600.4.5 Dampak Lingkungan
  - 600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan
  - 600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
  - 600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
- 600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan
  - 600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa
  - 600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
  - 600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
  - 600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak

- 600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan
  - 600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana dan Jasa
  - 600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
  - 600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
  - 600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak
- 600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
  - 600.4.8.1 Pengembangan
  - 600.4.8.2 Pemanfaatan
  - 600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik
  - 600.4.8.4 Keamanan Hayati
  - 600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan
- 600.4.9 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
  - 600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem
  - 600.4.9.2 Rawa
- 600.4.10 Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
  - 600.4.10.1 Perangkat mitigasi
  - 600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
  - 600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon
  - 600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
- 600.4.11 Adaptasi Perubahan Iklim
  - 600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
  - 600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim
- 600.4.12 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
  - 600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi
  - 600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
  - 600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
- 600.4.13 Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
  - 600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan
  - 600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan
  - 600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping
  - 600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
- 600.4.14 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
  - 600.4.14.1 Pemantauan
  - 600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemulihan Kontaminasi
- 600.4.15 Pengelolaan Sampah
  - 600.4.15.1 Pembatasan sampah
  - 600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
  - 600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura
  - 600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura

- 600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan
  - 600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
  - 600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan
- 600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan
  - 600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
  - 600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
- 600.4.18 Penegakan hukum pidana lingkungan
  - 600.4.18.1 Penyidikan
  - 600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
  - 600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS
- 600.4.19 Komunikasi Lingkungan
  - 600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi
  - 600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye
- 600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat
  - 600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan
  - 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan
- 600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat
  - 600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
  - 600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan
- 600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
  - 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat
  - 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha
- 600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan
  - 600.4.23.1 Pengelolaan Data
  - 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
  - 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
  - 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
- 600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
  - 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
  - 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
- 600.4.25 Standarisasi dan teknologi
  - 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
  - 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
  - 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan
- 600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
  - 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
  - 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

**700 PENGAWASAN**

**700.1 PENGAWASAN INTERNAL**

- 700.1.1 Rencana Pengawasan
  - 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
  - 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
  - 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
  - 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
  - 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
- 700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
  - 700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
  - 700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
  - 700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
  - 700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
  - 700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
  - 700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
  - 700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
  - 700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
  - 700.1.2.9 *Good Corporate Governance (GCG)*

**800 KEPEGAWAIAN**

**800.1 SUMBER DAYA MANUSIA**

- 800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
  - 800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan
  - 800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
  - 800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

- 800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai
  - 800.1.2.1 Formasi ASN, antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
  - 800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN, antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
  - 800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN
  - 800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
  - 800.1.2.5 Pengangkatan ASN
  - 800.1.2.6 Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)
  - 800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
  - 800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
- 800.1.3 Mutasi Pegawai
  - 800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
  - 800.1.3.2 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
  - 800.1.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
  - 800.1.3.4 Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
  - 800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja
  - 800.1.3.6 Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
- 800.1.4 Pengembangan Karir
  - 800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
  - 800.1.4.2 Penyesuaian ijazah
  - 800.1.4.3 Penyusunan Sistem Karier
  - 800.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
  - 800.1.4.5 Angka Kredit, antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
- 800.1.5 Kinerja Aparatur Sipil Negara
  - 800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
  - 800.1.5.2 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
  - 800.1.5.3 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
- 800.1.6 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN

- 800.1.6.1 Kode Etik Pegawai
- 800.1.6.2 Disiplin
- 800.1.6.3 Pemberhentian Dengan Hormat
- 800.1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
- 800.1.6.5 Pemberhentian Sementara
- 800.1.6.6 Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya
- 800.1.7 Bantuan Hukum
- 800.1.8 Status dan Kedudukan Pegawai
  - 800.1.8.1 Status Kepegawaian
  - 800.1.8.2 Kedudukan Kepegawaian
  - 800.1.8.3 Keberatan Pegawai
  - 800.1.8.4 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
- 800.1.9 Sistem Informasi Kepegawaian
  - 800.1.9.1 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
  - 800.1.9.2 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
  - 800.1.9.3 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
  - 800.1.9.4 Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
- 800.1.10 Pengawasan dan pengendalian
  - 800.1.10.1 Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
  - 800.1.10.2 Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
  - 800.1.10.3 Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
  - 800.1.10.4 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
  - 800.1.10.5 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
  - 800.1.10.6 Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorar
- 800.1.11 Administrasi Pegawai
  - 800.1.11.1 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
  - 800.1.11.2 Cuti Sakit
  - 800.1.11.3 Cuti Bersalin
  - 800.1.11.4 Cuti Tahunan
  - 800.1.11.5 Cuti Alasan Penting
  - 800.1.11.6 Cuti Besar
  - 800.1.11.7 Cuti Di luar Tanggungan Negara
  - 800.1.11.8 Karpeg/KPE/Karis/Karsu
  - 800.1.11.9 Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan
  - 800.1.11.10 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)

- 800.1.11.11 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
- 800.1.11.12 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- 800.1.11.13 Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
- 800.1.12 Kesejahteraan Pegawai
  - 800.1.12.1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
  - 800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS
  - 800.1.12.3 Tabungan Perumahan
  - 800.1.12.4 Bantuan Sosial
  - 800.1.12.5 Pakaian Dinas
  - 800.1.12.6 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
  - 800.1.12.7 Pemberian Tali Kasih
  - 800.1.12.8 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
  - 800.1.12.9 Olahraga dan Rekreasi
  - 800.1.12.10 Rekam Medis
- 800.1.13 Administrasi Perseorangan
  - 800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  - 800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
  - 800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
  - 800.1.13.4 Sekretaris Daerah
  - 800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
- 800.1.14 Penilaian Kompetensi
  - 800.1.14.1 Penilaian Kompetensi
  - 800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi
- 800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
  - 800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah
  - 800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
    - 800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
    - 800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
    - 800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
    - 800.2.2.4 Modul-modul diklat
    - 800.2.2.5 Panduan fasilitator
    - 800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
    - 800.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
    - 800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
    - 800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
  - 800.2.3 Widyaiswara

- 800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
- 800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
- 800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
- 800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara
- 800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
- 800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
- 800.2.4 Penyelenggaraan Diklat
  - 800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
  - 800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
  - 800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
  - 800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
  - 800.2.4.5 Sistem informasi diklat
  - 800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat
  - 800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
- 800.2.5 Alumni

## **900 KEUANGAN**

### **900.1 KEUANGAN DAERAH**

- 900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
  - 900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
  - 900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
  - 900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
  - 900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
- 900.1.2 Penyusunan Anggaran
  - 900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
  - 900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
  - 900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
  - 900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- 900.1.3 Pelaksanaan Anggaran
  - 900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D); UP, GU, TU, LS
  - 900.1.3.2 Pendapatan

- 900.1.3.3 Belanja
- 900.1.3.4 Pembiayaan Daerah
- 900.1.3.5 Dokumen Penatausahaan Keuangan
- 900.1.3.6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
- 900.1.3.7 Daftar Gaji
- 900.1.3.8 Kartu Gaji
- 900.1.3.9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
- 900.1.3.10 Laporan Keuangan
- 900.1.4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri
  - 900.1.4.1 Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
  - 900.1.4.2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
  - 900.1.4.3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
  - 900.1.4.4 Dokumen Loan Agreement (PHLN), antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
  - 900.1.4.5 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana
  - 900.1.4.6 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
  - 900.1.4.7 Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
  - 900.1.4.8 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya (SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya)
  - 900.1.4.9 Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor), antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
  - 900.1.4.10 Staff Appraisal Report
  - 900.1.4.11 Report /Laporan
  - 900.1.4.12 Laporan Hutang Daerah
  - 900.1.4.13 *Completion Report/Annual Report*
  - 900.1.4.14 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- 900.1.5 Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
- 900.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
  - 900.1.6.1 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
  - 900.1.6.2 Dokumen Kebijakan Akuntansi
  - 900.1.6.3 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi

- 900.1.6.4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
- 900.1.7 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
  - 900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
  - 900.1.7.2 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya, antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
  - 900.1.7.3 Buku Rekening Bank
  - 900.1.7.4 Keputusan Pembukuan Rekening
  - 900.1.7.5 Pembukuan anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
- 900.1.8 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
  - 900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
  - 900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
- 900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD , antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

- 900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
  - 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
  - 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
  - 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
  - 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
- 900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
  - 900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
  - 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
  - 900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
  - 900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
- 900.1.12 Anggaran Daerah
  - 900.1.12.1 Anggaran Daerah
  - 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah
- 900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah
  - 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
  - 900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah

- 900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
- 900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
- 900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah, antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
- 900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan
  - 900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
  - 900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

- 900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
- 900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
- 900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
- 900.1.15 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
  - 900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
  - 900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
  - 900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
  - 900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

PARAF KOORDINASI		
No	JAWABAN KERJA	PARAF
1	Cekdik	[Signature]
2	Asisten III	[Signature]
3	Kabag Hukum	[Signature]
4	Kadis Perpustakaan	[Signature]
5	Kabid Keasipan	[Signature]

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BOMBANA  
 NOMOR 32 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS (KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM  
 KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS)  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOJAH
	P	SP	S					
I.	000	000.1		UMUM				
			000.1.1	A. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				
				1. Telekomunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.2	2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.1.3		3. Perjalanan Dinas Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.3.3	c. Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			000.1.4	4. Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.5	5. Rapat Pimpinan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.6	6. Penyediaan Konsumsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.7	7. Pengurusan Kendaraan Dinas a. Pengurusan Surat-Surat kendaraan Dinas b. Pemeliharaan dan Perbaikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.7.1	a. Pengurusan Surat-Surat kendaraan Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.7.2	b. Pemeliharaan dan Perbaikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.7.3	c. Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.8	8. Pemeliharaan Gedung, Taman, dan Peralatan Kantor a. Pertamanan/ <i>Landscape</i> b. Penghijauan c. Perbaikan Gedung d. Perbaikan Peralatan Kantor e. Perbaikan Rumah Dinas/Wisma	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.8.1	a. Pertamanan/ <i>Landscape</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.8.2	b. Penghijauan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.8.3	c. Perbaikan Gedung	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.8.4	d. Perbaikan Peralatan Kantor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.8.5	e. Perbaikan Rumah Dinas/Wisma	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
			000.1.8.6		f. Kebersihan Gedung dan Taman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.1.9			9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.9.1		a. Perbaikan/Pemeliharaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.9.2		b. Pemasangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.1.10			10 Ketersiban dan Keamanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.10.1		a. Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.1.10.2		b. Laporan Ketersiban dan Keamanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.1.11			11. Administrasi Pengelolaan Parkir	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.1.12			12. Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000.2				<b>B. PERLENGKAPAN</b>				
		000.2.1			1. Inventarisasi dan Penyimpanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.2.1.1		a. Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.2.1.2		b. Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.2.2			2. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.2.2.1		a. Data Hasil Pemeliharaan Kantor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.2.2.2		b. Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.2.3			3. Distribusi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				000.2.3.1	a. Barang Habis Pakai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.2.3.2	b. Barang Milik Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.2.4		4. Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang Dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD Termasuk di dalamnya Proses Lelang Penghapusan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.2.5		5. Pengelolaan <i>Database</i> Barang Milik Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.3			<b>C. PENGADAAN</b>				
			000.3.1		1. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa, Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan, Penetapan Kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.3.2		2. Pengadaan Langsung, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.3.3		3. Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.3.4		4. Swakelola, antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			000.3.5		Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.3.6		Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000.4			<b>D. PERPUSTAKAAN</b>				
			000.4.1	1. Kebijakan di Bidang Perpustakaan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.2	2. Deposit Bahan Pustaka	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Terbitan Internasional dan Regional	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				e. Bibliografi dan Katalog	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.4.3		3. Koleksi Pustaka	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				a. Pembelian	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Hibah	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Hadiah	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Tukar Menukar	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
					000.4.3.1			
					000.4.3.2			
					000.4.3.3			
					000.4.3.4			

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				000.4.3.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.3.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.3.7	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.3.8	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.4.4			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.4.5			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.4.6			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.6.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.6.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.4.6.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.4.7			Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				000.4.7.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				000.4.7.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			000.4.8	000.4.7.3 000.4.8.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.8	000.4.8.2 000.4.8.3 000.4.8.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.9	000.4.10.1 000.4.10.2 000.4.10.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.10	000.4.10.1 000.4.10.2 000.4.10.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.11	000.4.10.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.12		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.4.13		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOIAH
	P	SP	S					
			000.4.14	14. Pengembangan Perpustakaan a. Perpustakaan Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Perpustakaan Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Perpustakaan Sekolah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Perpustakaan Perguruan Tinggi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.5		<b>E. KEARSIPAN</b>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.1	1. Kebijakan Kearsipan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.2	2. Pembinaan Kearsipan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				a. Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Penilaian Arsiparis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				e. <i>Database</i> Arsiparis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				f. Bimbingan Konsultasi Kearsipan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				g. Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	P	SP	S					
				000.5.2.8	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.2.9	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.2.10	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.2.11	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.5.3		000.5.3.1	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.3.2	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.3.3	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.3.4	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.3.5	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.5.4			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.5.5			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			000.5.6	000.5.6.1	6. Penyusutan Arsip a. Pemindahan Arsip, antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang Dipindahkan	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.6.2	b. Pemusnahan Arsip, meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip yang Dimusnahkan	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.5.6.3	c. Penyerahan Arsip Statis, meliputi: Pembentukan panitia penilai, Notulen Rapat Panitia, Surat Pertimbangan Panitia Penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan Digunakan dari Pencipta Arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.5.7			7. Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan Alih Media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.5.8			8. Database Pengelolaan Arsip Dinamis a. Database Pengelolaan Arsip Aktif b. Database Pengelolaan Arsip Inaktif	Biasa Biasa	Eselon III Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait
		000.5.9			9. Pengelolaan Arsip Statis	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			00.5.9.1	a. Akuisisi, Meliputi: Monitoring Fisik dan Daftar, Verifikasi terhadap Daftar Arsip, Menetapkan Status Arsip Statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan Arsip yang Diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.2	b. Penghargaan dan Imbalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.3	c. Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi Kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/Media Lain Sesuai Perkembangan TI) dan Transkrip	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.4	d. Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: Pengumuman, Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.5	e. Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis, <i>Guide</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.6	f. Preservasi Preventif, antara lain: Penyimpanan, Pengendalian Hama Terpadu, Reproduksi (Alih Media)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.7	g. Preservasi Kuratif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.8	h. Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.9	i. Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan Arsip, Penerbitan Naskah Sumber	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		00.5.10		10. Jasa Kearsipan, antara lain: Konsultasi Kearsipan, Manual Kearsipan, Penataan Arsip, Otomasi Kearsipan, Penyimpanan Arsip, Perawatan dan Pemeliharaan Arsip	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.5.11		11. Pengelolaan SIKN dan JIKN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			000.5.12		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.13		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.14		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.15		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.15.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.15.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.5.15.3		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		000.6						
			000.6.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.6.2		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			000.6.2.1		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			000.6.2.2		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			000.6.2.3		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			000.6.3		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.6.3.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				000.6.3.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.3.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.3.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.6.4		000.6.4.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.4.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.6.5		000.6.5.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.5.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.5.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.5.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.5.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.6.5.6	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas	Unit Kerja Terkait
				000.6.5.7	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.7		000.7.1						
							<b>G. PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	
							1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang	

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				000.7.1.1	a. Musrenbang Provinsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.1.2	b. Musrenbang Nasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.1.3	c. Musrenbang Kab/Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.1.4	d. Musrenbang Kecamatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.1.5	e. Musrenbang Kelurahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.1.6	f. Musrenbang Desa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.7.2		000.7.2.1	2. Perencanaan Pembangunan Daerah a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.1	b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.3	c. Rencana Anggaran Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.4	d. Rencana Pembangunan Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.5	e. Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.6	f. Program Kerja Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.7	g. Penetapan/Kontrak Kinerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				000.7.2.8	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.9	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.2.10	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.7.3			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.7.4			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.7.5			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.7.6			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.7.6.1		Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.7.6.2		Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.7.6.3		Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.7.6.4		Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.7.6.5		Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000.7.7			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.7.7.1		Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.7.7.2		Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				000.7.7.3	c. Kerja Sama Pembangunan Nasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.7.4	d. Surat Berharga Syariah Negara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.7.7.5	e. Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.1	<b>H. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>				
				000.8.1.1	1. Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.1.2	a. Pembentukan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.1.3	b. Pengubahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.2	c. Pembubaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.2.1	2. Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.2.2	a. Analisa Jabatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.3	b. Analisa Beban Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.3.1	3. Ketatalaksanaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.3.2	a. Proses Bisnis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.3.3	b. Standar Pelayanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.3.3	c. Standar Operasional Prosedur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				000.8.3.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.8.4		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.8.5		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.8.6		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.6.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.6.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.8.6.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000.9							
			000.9.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.9.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.9.3		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.9.4		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.9.5		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			000.9.6		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				000.9.6.1	a. Data	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.9.6.2	b. Statistik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.9.6.3	c. Jurnal Hasil Penelitian/Pengkejaian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.9.7	7. <i>Master Proceeding</i> /Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.9.8	8.. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.9.9	9. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				000.9.10	10. Seminar, Lokakarya, Temukarya, <i>Workshop</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
II.	100				<b>PEMERINTAHAN</b>				
		100.1			<b>A. OTONOMI DAERAH</b>				
			100.1.1		1. Kebijakan Otonomi Daerah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.1.2		2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.1.3		3. Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			100.1.4		4. Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar a. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				100.1.4.2	b. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.1.4.3	c. Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.1.4.4	d. Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.1.4.5	e. Asosiasi Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.1.5		5. Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.1.6		6. Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.1.6.1	a. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.1.6.2	b. Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.1.6.3	c. Pengembangan Kapasitas Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			100.1.7		7. LKPJ/LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		100.2			<b>B. PEMERINTAHAN UMUM</b>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.2.1		1. Kebijakan di Bidang Pemerintahan Umum yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.2.2		2. Dekonsentrasi dan Kerja Sama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				100.2.2.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.2.2.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.2.2.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.2.2.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.2.2.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		100.2.3		100.2.3.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.2.3.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.2.3.3	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.2.3.4	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.2.3.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		100.3		100.3.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			100.3.2	<p>2. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Rancangan Peraturan Daerah, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal Sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum Sampai Diundangkan</p>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.3.3	<p>3. Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah</p> <p>a. Keputusan/Ketetapan Gubernur</p> <p>b. Keputusan/Ketetapan Bupati</p> <p>c. Keputusan/Ketetapan Walikota</p> <p>d. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi</p> <p>e. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten</p> <p>f. Keputusan Sekretaris Daerah Kota</p>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.3.4	<p>4. Instruksi/Surat Edaran</p> <p>a. Instruksi/Surat Edaran Provinsi</p> <p>b. Instruksi/Surat Edaran Kabupaten</p> <p>c. Instruksi/Surat Edaran Kota</p> <p>d. Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II</p>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			100.3.5	5 Surat Perintah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	P	SP	S	T					
				100.3.5.1	a. Surat Perintah Gubernur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.3.5.2	b. Surat Perintah Bupati	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.3.5.3	c. Surat Perintah Walikota	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				100.3.5.4	d. Surat Perintah Setingkat Eselon II	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		100.3.6			6. Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		100.3.7			7. Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.3.7.1	a. Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				100.3.7.2	b. Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		100.3.8			8. Dokumentasi Hukum, antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang Dijadikan Referensi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		100.3.9			9. Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		100.3.10			10. Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			100.3.11	11. Kasus/Sengketa Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			100.3.11.1	a. Pidana Kasus/Sengketa Pidana, baik Kejahatan maupun Pelanggaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			100.3.11.2	b. Perdata Kasus/Sengketa Perdata	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			100.3.11.3	c. Tata Usaha Negara	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan	Unit Kerja Terkait
			100.3.11.4	d. Perburuhan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			100.3.11.5	e. Arbitrase	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan	Unit Kerja Terkait
			100.3.11.6	f. Sengketa Adat	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan	Unit Kerja Terkait
		100.3.12		12. Perizinan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas	Unit Kerja Terkait
		100.3.13		13. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			100.3.13.1	a. Hak Cipta	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait



NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			200.1.3	3. Kewaspadaan Nasional a. Fasilitas dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Keamanan	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				b. Fasilitas Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan c. Fasilitas dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Fasilitas dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				e. Fasilitas Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
		200.1.4		4. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasarakatan a. Ketahanan Seni b. Ketahanan Budaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
					Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
				200.1.4.3	c. Agama dan Kepercayaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.4	d. Organisasi Kemasyarakatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.5	e. Masalah Sosial Kemasyarakatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.6	f. Fasilitasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.7	g. Pelaksanaan Identifikasi dan Komplasi Organisasi Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.8	h. Laporan Hasil Kerja Sama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.9	i. Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.10	j. Fasilitasi Sengketa Ormas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.4.11	k. Fasilitasi Ormas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		200.1.5		200.1.5.1	5. Politik Dalam Negeri a. Implementasi Kebijakan Politik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.2	b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.3	c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.4	d. Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik yang Memperoleh Kursi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.5	e. Partai Politik yang Tidak Memperoleh Kursi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
				200.1.5.6	f. Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.7	g. Database Parpol	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.8	h. Pendidikan Budaya Politik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.5.9	i. Pemilihan Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		200.1.6		200.1.6.1	6. Ketahanan Ekonomi a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.6.2	b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.6.3	c. Perilaku Perekonomian Masyarakat	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				200.1.6.4	d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait



NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				200.2.4.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.4.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.4.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		200.2.5		200.2.5.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.5.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.5.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.5.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.5.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.5.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		200.2.6		200.2.6.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				200.2.6.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				0200.6.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		200.2.7		200.2.7.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	T					
				b. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Laporan Hasil Audit Dana Kampanye	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		200.2.8		8. Pemungutan dan Penghitungan Suara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.7.2	a. Keputusan KPU tentang Desah dan Spesifikasi Surat Suara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.7.3	b. Master Surat Suara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.8.2	c. Surat Suara yang Terpakai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.8.3	d. Surat Suara Tidak Terpakai (Rusak, Salah, dan Tidak Digunakan)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.8.4	e. Formulir Pemilu di Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		200.2.9		9. Penetapan Hasil Pemilu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.8.5	10. Perselisihan Hasil Pemilu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.10	a. Surat-Surat Mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.10.1	b. Jawaban dan Kesimpulan Termohon	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.10.2	c. Salinan Putusan Lembaga Peradilan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			200.2.10.3	11. Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		200.2.11			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	P	SP	S	T					
IV.	300	300.1	300.1.1	300.1.1.1	<b>KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b> <b>A. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b> 1. Kebijakan di Bidang Polisi Pamong Praja yang Dilakukan di Pemerintah Daerah 2. Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja a. Tata Operasional Polisi Pamong Praja b. Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja 3. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja 4. Perlindungan Masyarakat 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 6. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.1.2	300.1.2.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.1.3	300.1.2.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.1.4			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.1.5			Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
		300.2	300.1.6		Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy,	Unit Kerja Terkait	
			300.2.1		<b>B. PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN</b> 1. Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Perbekalan a. Perencanaan dan Standardisasi dan Pengawasan dan Perbekalan b. Kurikulum dan Silabus, Evaluasi dan Monitoring c. Tenaga Pencarian Pertolongan, Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.2	300.2.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.2.1	300.2.2.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.2.2	300.2.2.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			300.2.2.3	300.2.2.3		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	P	SP	S	T					
				300.2.2.4	d. Permayarakatan Pencarian dan Pertolongan, Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.2.5	e. Perencanaan dan Standardisasi, Penyelenggaraan Operasi SAR, Siaga dan Latihan, Tempat Latihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.2.6	f. Registrasi BEACON	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		300.2.3			3. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		300.2.4			4. Potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		300.2.5			5. Bina Ketenagaan dan Permayarakatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.5.1	a. Rencana Pendidikan dan Pelatihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.5.2	b. Penyiapan Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.5.3	c. Permayarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.5.4	d. Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.5.5	e. Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		300.2.6			6. Operasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		300.2.7			7. Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		300.2.8			8. Operasi Komunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.8.1	a. Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				300.2.8.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.8.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.9	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.10	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.11	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.12	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.12.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.12.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.12.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				300.2.12.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
V.	400	400.2	400.2.1	<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  <b>A. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> 1. Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum a. Data Gender b. Advokasi dan Fasilitasi  3. Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan) a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan b. Data Perlindungan Perempuan c. Advokasi dan Fasilitasi d. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan e. Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender f. Analisis dan Penyajian Informasi Gender h. Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Ibu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.2.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.2.2		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			400.2.3.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.3.2		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			400.2.3.3		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			400.2.3.4		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.3.5		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.3.6		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.3.7	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			400.2.4				4. Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan dengan Hukum)	
				400.2.4.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.4.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.2.4.3	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.2.4.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.5				5. Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak	
				400.2.4.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.5.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.5.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.5.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.2.5.4	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.2.5.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.2.5.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.6		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.7		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.2.8		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.3						
			400.3.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.3.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.2.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.2.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.2.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.2.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.3.3						
				400.3.3.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.3.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.3.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

PENGOLA

Kerja Terka

Kerja Terka

Kerja Terka

Kerja Terka

Kerja Terka

Kerja Terka

Kerja Terka

Kerja Terka

Kerja Terka

Kerja Terka

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	P	SP	S					
				400.3.3.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.3.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.3.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.3.7	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.3.8	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.5.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.5.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.5.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.5.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.5.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.5.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.6.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.3.6.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.6.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.6.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.6.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.6.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				<b>400.3.7</b>				
				400.3.7.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.7.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.7.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.7.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.7.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.7.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.7.7	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				<b>400.3.8</b>				
				400.3.8.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.3.8.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.8.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.8.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.8.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.8.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.8.7	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.8.8	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				<b>400.3.9</b>				
				400.3.9.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				400.3.9.7	g. Alat Bantu Pembelajaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.8	h. Pendataan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.9.9	i. Kelembagaan (Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusi)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.3.10		400.3.10.1	10 Pendidik dan Tenaga Pendidik a. Pendataan dan Pemetaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.10.2	b. Uji Kompetensi Guru	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.10.3	c. Sertifikasi Guru	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.10.4	d. Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.10.5	e. Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.10.6	f. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.10.7	g. <i>Block Grant</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.10.8	h. Bimbingan Teknis/Sosialisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.3.11		400.3.11.1	11. Penilaian Pendidikan a. Penilaian Akademik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				400.3.11.2	b. Penilaian Non Akademik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.3.11.3	c. Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		400.3.12		400.3.12.1	12. Data dan Statistik Pendidikan a. Data Peserta Sidik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.12.2	b. Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.3.13		400.3.13.1	13. Prasarana dan Sarana Pendidikan a. Prasarana Pendidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.13.2	b. Sarana Pendidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.3.13.3	c. Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.4		400.4.1	<b>C. KEOLAHRAGAAN</b> 1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.2	400.4.2.1	2. Pengelolaan Olahraga Pendidikan a. Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.2.2	b. Olahraga Pendidikan Tinggi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.2.3	c. Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.4.3			3. Pengelolaan Olahraga Rekreasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			400.4.3.1	a. Olahraga Massal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.3.2	b. Olahraga Tradisional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.3.3	c. Olahraga Petualangan, Tantangan, dan Wisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.4.4		4. Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.4.1	a. Olahraga Pendidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.4.2	b. Olahraga Rekreasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.4.3	c. Olahraga Prestasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.4.4	d. Sekolah Khusus Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.4.5		5. Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.5.1	a. Olahraga Tradisional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.5.2	b. Layanan Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.4.6		6. Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.6.1	a. Kemitraan Keolahragaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.4.6.2	b. Penghargaan Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.4.7		7. Pembibitan dan IPYTK Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				400.4.7.1	a. Pembibitan Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.7.2	b. Kompetisi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.7.3	c. IPTEK Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.4.8			8. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan				
				400.4.8.1	a. Tenaga Keolahragaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.8.2	b. Organisasi Keolahragaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.4.9			9. Industri dan Promosi Olahraga				
				400.4.9.1	a. Industri Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.9.2	b. Promosi Olahraga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.4.10			10. Olahraga Prestasi				
				400.4.10.1	a. Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.10.2	b. Nasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.10.3	c. Internasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.4.11			11. Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga				
				400.4.11.1	a. Standardisasi Keolahragaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.4.11.2	b. Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.5.5.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.5.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.5.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.5.6		400.5.6.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.6.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.5.7		400.5.7.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.7.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.7.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.5.8		400.5.8.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.8.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.8.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.5.8.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.5.9		400.5.9.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
			400.5.10	400.5.9.2 400.5.10.1	b. Infrastruktur Pemuda  10. Kemitraan dan Penghargaan Pemuda a. Kemitraan	Biasa  Biasa	Eselon III  Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait  Unit Kerja Terkait
			400.5.10.2		b. Penghargaan Pemuda	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	400.6		400.6.1		<b>E. KEBUDAYAAN</b> 1. Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.6.2	400.6.2.1	2. Pelestarian Cagar Budaya dan Permusseman a. Registrasi Nasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.2.2	b. Peleindungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.2.3	c. Pengembangan dan Pemanfaatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.2.4	d. Eksplorasi dan Dokumentasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.6.3	400.6.3.1	3. Pembinaan Kesenian dan Perfilman a. Pembinaan Seni Pertunjukan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.3.2	b. Pembinaan Seni Rupa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.3.3	c. Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.3.4	d. Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.6.4		4. Sejarah dan Nilai Budaya				

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.6.4.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.4.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.4.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.4.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.4.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.4.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.6.5		400.6.5.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.5.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.5.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.6.5.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	400.7							
		400.7.1			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.2			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.2.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			400.7.2.2	b. Praktik Klinis Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.3	c. Pelaksanaan Kesehatan Primer	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.4	d. Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.5	e. Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.6	f. ICD 10, <i>Destisry</i> , dan <i>Stomatology</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.7	g. Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.8	h. Penyakit Mulut di Tingkat Primer	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.9	i. Pembiayaan Darah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.10	j. Penggunaan Darah Rasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.11	k. Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.12	l. Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil, dan Kepulauan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.13	m. Akreditasi Puskesmas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.14	n. Puskesmas Berprestasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.3		3. Upaya Kesehatan Rujukan				

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			400.7.3.1	a. Pelayanan Kesehatan Rujukan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.2	b. Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.3	c. Pelayanan Rumah Sakit Privat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.4	d. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.5	e. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.6	f. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.7	g. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.8	h. Badan Pengawas Rumah Sakit	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.9	i. Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.10	j. Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.4		4. Keperawatan dan Keteknisian Medik				
			400.7.4.1	a. Pelayanan Keperawatan Dasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.4.2	b. Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.4.3	c. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			400.7.4.4	d. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.4.5	e. Bina Pelayanan Kebidanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.5	400.7.5.1	5. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan a. Mikrobiologi dan Imunologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.5.2	b. Patologi dan Toksikologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.5.3	c. Radiologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.5.4	d. Perizinan dan Sertifikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.5.5	e. Sarana dan Prasarana Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.5.6	f. Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.5.7	g. Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.6	400.7.6.1	6. Kesehatan Jiwa a. Kesehatan Jiwa di Nonfasilitas Pelayanan Kesehatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			400.7.6.2	b. Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			400.7.6.3	c. Etikolegal dan Aesmen	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.7.6.4	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.7.6.6	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		400.7.7		400.7.7.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.7.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.7.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.7.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.8		400.7.8.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.8.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.8.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.8.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.8.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.9		400.7.9.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				b. Pengendalian Arbovirosis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Pengendalian Zoonosis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.10		10. Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.10.1	a. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.10.2	b. Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.10.3	c. Penyakit Kanker	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.10.4	d. Penyakit Kronis dan Generatif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.10.5	e. Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.11		11. Penyehatan Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.11.1	a. Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.11.2	b. Pemukiman dan Tempat Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.11.3	c. Kawasan dan Sanitasi Darurat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.11.4	d. Higien Sanitasi Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.11.5	e. Pengamanan Limbah, Udara, Radiasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	P	SP	S					
			400.7.12		Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.13		Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.13.1	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.13.2	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.13.3	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.13.4	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.13.5	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.14		Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.14.1	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.14.2	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.14.3	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.14.4	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.14.5	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.15		Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.15.1	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.7.15.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.15.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.15.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.15.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.16				16. Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer	
				400.7.16.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.16.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.16.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.16.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.17				17. Kesehatan Kerja dan Olahraga	
				400.7.17.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.17.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.17.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.17.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.7.17.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.17.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.18		400.7.18.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.18.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.18.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.19		400.7.19.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.19.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.19.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.20		400.7.20.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.20.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.20.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.20.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			400.7.21	400.7.21.1 400.7.21.2 400.7.21.3 400.7.21.4	Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait
			400.7.22	400.7.22.1 400.7.22.2	Biasa Biasa	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait
			400.7.23	400.7.23.1 400.7.23.2 400.7.23.3 400.7.23.4 400.7.23.5	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait
			400.7.24	24. Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.7.24.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.24.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.25		400.7.25.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.25.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.26		400.7.26.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.26.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.27		400.7.27.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.27.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.27.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.27.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.28		400.7.28.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.7.28.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			400.7.28.3	c. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.29		29. Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.29.1	a. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.29.2	b. Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.29.3	c. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.29.4	d. Obat Asli Indonesia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.30		30. Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.30.1	a. Penilaian Keamanan Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.30.2	b. Standardisasi Produk Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.30.3	c. Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.30.4	d. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.7.30.5	e. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.7.31		31. Rekam Medis	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
		400.9						
		400.9.1			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.9.2			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.2.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.2.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.2.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.2.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.2.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.9.3			Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.9.3.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.9.3.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.9.3.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.9.4			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.4.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.4.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.9.4.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.4.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.9.5			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.9.6			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.6.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.6.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.6.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.9.7			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.9.8			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.9.9			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.9.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.9.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.9.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.9.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.9.10			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.10.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
				400.9.10.2	b. Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.10.3	c. Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.10.4	d. Kerja Sama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.9.11		400.9.11.1	11. Jaminan Sosial a. Seleksi dan Verifikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.11.2	b. Asuransi Kesejahteraan Sosial Meliputi Kelembagaan, Pengelolaan Premi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.11.3	c. Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan Meliputi Pendampingan dan Penyaluran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.11.4	d. Kerja Sama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.9.12			12. Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial				
				400.9.12.1	a. Ketahanan Keluarga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.12.2	b. Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.12.3	c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.12.4	d. Kemitraan Dunia Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.12.5	e. Karang Taruna Meliputi Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.9.13			13. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil				

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.9.13.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.13.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.13.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.13.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.13.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.14					
				400.9.14.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.14.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.14.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.14.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.14.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.14.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.9.15					
				400.9.15.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.9.15.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.15.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.9.15.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	400.10							
				400.10.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.2.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.2.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.2.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.2.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.2.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.3.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.3.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.3.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.10.3.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.3.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.10.4		4. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat				
				a. Budaya Nusanantara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Pemberdayaan Perempuan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Kesejahteraan Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				e. Tenaga Kerja Perdesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.10.5		5. Usaha Ekonomi Masyarakat				
				a. Usaha Pertanian dan Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Usaha Perkeditan dan Simpan Pinjam	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Produksi dan Pemasaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Usaha Ekonomi dan Keluarga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				e. Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.10.6		6. Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan				

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.10.6.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.6.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.6.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.6.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.10.6.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.10.7		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.12						
			400.12.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.12.2		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.2.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.2.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.2.3	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.2.4	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				400.12.2.5	e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		400.12.3		400.12.3.1	3. Pencatatan Sipil a. Kelahiran dan Kematian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.3.2	b. Perkawinan dan Perceraian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.3.3	c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.3.4	d. Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.3.5	e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		400.12.4			4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
				400.12.4.1	a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.4.2	b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.4.3	c. Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.12.4.4	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				400.12.4.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.12.5		400.12.5.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.5.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.5.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.5.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.5.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.12.6		400.12.6.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.6.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.6.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.6.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.12.6.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
		400.13						
		400.13.1			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.2			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.2.1			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.2.2			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.3			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.3.1			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.3.2			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.4			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.4.1			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.4.2			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.5			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.5.1			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.5.2			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.6			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.6.1			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.6.2			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.7			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.7.1			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			400.13.8	400.13.7.2 400.13.8.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.9	400.13.8.2 400.13.9.1 400.13.9.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.10		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.11		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.12		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.13		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.14		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.15		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.16	400.13.16.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.13.16.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.17	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.18	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.19	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.19.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.19.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.20	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.20.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.20.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.21	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.21.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.21.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.22	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.22.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.22.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			400.13.23		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.24		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.25		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.26		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.27		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.28		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.29		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.30		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.13.30.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.30.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.31		400.13.31.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.31.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.32		400.13.32.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.32.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.33			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.34			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.35			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.35.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.35.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			400.13.36		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.37		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.38		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.38.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.38.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.39		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.39.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.39.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.40		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.40.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.40.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.41		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.42		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.42.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.42.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.13.42.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.43			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.44			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.44.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.44.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.45			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.45.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.45.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.46			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.36.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.36.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.47			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.13.47.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			400.13.47.2	b. Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.48	400.13.48.1	48. Mekanisme Operasional Lini Lapangan a. Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.48.2	b. Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.49		49. Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.49.1	a. Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.49.2	b. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.50		50. Pengumpulan dan Pengolahan Data	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.51		51. Analisis dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.51.1	a. Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.51.2	b. Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.13.52		52. Sistem Aplikasi dan Bank Data	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.52.1	a. Pengembangan Sistem Aplikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.52.2	b. Pengelolaan Bank Data	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
			400.13.53	400.13.53.1	53. Infrastruktur Teknologi Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.53	400.13.53.2	a. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.54	400.13.54.1	b. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.13.54	400.13.54.2	54. Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14	400.14.1.1	a. Dokumentasi dan Perpustakaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14	400.14.1.2	b. Pengelolaan Situs BKKB dan Media Konferensi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.1	400.14.1.3	<b>N. HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.1	400.14.1.4	1. Keprotokolan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.3	400.14.3	a. Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan, Termasuk Acara Peringatan Hari-Hari Besar)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.4	400.14.4.1	b. Buku Tamu Keprotokolan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.2	400.14.1.4	c. Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.3	400.14.1.4	d. Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.4	400.14.1.4	2. Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.3	400.14.1.4	3. Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-Peristiwa Bidang Masing-Masing, dalam Berbagai Media: Kertas, Foto/Video/Rekaman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.4	400.14.1.4	4. Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.4	400.14.4.1	a. Kliping Koran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				400.14.4.2	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.4.3	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.14.5		400.14.5.1	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.5.2	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.5.3	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.5.4	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.5.5	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				400.14.5.6	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.14.6			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.14.7			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.14.8			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.14.9			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		400.14.10			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			400.14.11		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			400.14.12		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
VI.	500	500.1						
			500.1.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.1.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.2.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.2.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.2.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.1.3		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.3.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.3.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.3.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.1.4		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.4.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.1.4.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			500.1.5	500.1.4.3 500.1.5.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.1.6	500.1.5.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.1.7		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.1.8		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	500.2	500.2.1	500.2.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.3		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.4		Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				500.2.2.5	e. Pelaku Pasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.6	f. Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.7	g. Fasilitas Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.8	h. Pengembangan Produk Lokal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.9	i. Pencitraan Produk Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.10	j. Pengembangan Sarana Distribusi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.11	k. Pengelolaan Sarana Distribusi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.12	l. Kerja Sama Pengembangan Sistem Logistik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.13	m. Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.14	n. Informasi Pasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.15	o. Informasi Hasil Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.16	p. Barang Strategis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.2.17	q. Bahan Pokok Agro	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3	3. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.1	a. Kelembagaan dan Informasi Standar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				b. Kerja Sama Standardisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.2	c. Perumusan dan Penerapan Standar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.3	d. Tata Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.4	e. Kerja Sama, Informasi, dan Publikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.5	f. Analisa Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.6	g. Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.7	h. Fasilitas Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.8	i. Produk Pertambangan dan Aneka Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.9	j. Produk Pertanian, Kimia, dan Kehutanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.10	k. Jasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.11	l. Kerja Sama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.12	m. Sarana dan Kerja Sama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.13	n. Kelembagaan dan Penilaian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.14	o. UTP dan Standar Ukuran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.15	p. Pengawasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.16					

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.2.3.17	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.3.18	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.2.4		500.2.4.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.7	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.8	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.2.4.9	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.2.5			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.2.6			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.3			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.3.1			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.3.2			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.2.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.3.2.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.2.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.2.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.3.3		500.3.3.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.3.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.3.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.3.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.3.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.3.4		500.3.4.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.4.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.3.4.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.4.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.4.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.4.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.3.5		500.3.5.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.5.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.5.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.5.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.5.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.5.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.3.6		500.3.6.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.6.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.3.6.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.6.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.6.5	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		500.3.7		500.3.7.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.7.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.7.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.7.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.7.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.3.8		500.3.8.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.8.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.8.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.3.8.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			500.3.9	9. Kerja Sama Hubungan Antarlembaga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.3.10	500.3.10.1	10 Pedagang Kaki Lima (PKL) a. Peraturan Perundang-Undangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.3.10.2	b. Sarana dan Prasarana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.3.11		11. Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	500.5	500.5.1		<b>D. KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.5.2		1. Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.1	2. Perikanan Tangkap a. Data dan Statistik Perikanan Tangkap	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.2	b. Rancang Bangun dan Kelainan Kapal Perikanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.3	c. Rancang Bangun dan Kelainan Alat Tangkap Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.4	d. Pendaftaran Kapal Perikanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.5	e. Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.6	f. Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			500.5.2.7	g. Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.8	h. Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.9	i. Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.10	j. Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.11	k. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.12	l. Kelengkapan Usaha Penangkapan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.13	m. Investasi dan Permodalan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.14	n. Kenelayanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.15	o. Pembinaan Pengelolaan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.2.16	p. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.5.3		3. Perlindungan Budi Daya				
			500.5.3.1	a. Potensi Lahan dan Air	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.2	b. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.3	c. Pengelolaan Induk Perbenihan Ikan Air Tawar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.4	d. Perbenihan Skala Kecil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				500.5.3.5	e. Informasi dan Distribusi Pembenihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.6	f. Budidaya Air Tawar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.7	g. Budidaya Ikan Hias	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.8	h. Sertifikasi Budi Daya Perikanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.9	i. Data dan Statistik Perikanan Budi Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.10	j. Hama dan Penyakit Ikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.11	k. Perlindungan Lingkungan Budi Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.12	l. Investasi dan Permodalan Usaha Budi Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.13	m. Kewirausahaan Budi Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.14	n. Pelayanan Usaha Budi Daya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.15	o. Kelembagaan dan Ketenagakerjaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.3.16	p. Promosi Usaha dan Budaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.5.4		500.5.4.1	4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Standarisasi Pengolahan Hasil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.2	b. Pengembangan Produk	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			500.5.4.3	c. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.4	d. Industri Pengolahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.5	e. Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.6	f. Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.7	g. Promosi dan Jaringan Iklan Hias	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.8	h. Pengembangan Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.9	i. Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Nonkonsumsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.10	j. Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.11	k. Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.12	l. Jaringan Distribusi dan Mitraan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.13	m. Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.14	n. Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.15	o. Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.16	p. Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				500.5.4.17	q. Pengembangan Ekspor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.18	r. Pengendalian Impor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.19	s. Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.20	t. Pelayanan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.21	u. Kemitraan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.22	v. Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.23	w. Investasi dan Permodalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.4.24	x. Informasi dan Promosi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.5.5		500.5.5.1	5. Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil a. Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.2	b. Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
				500.5.5.3	c. Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemiripan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.4	d. Informasi dan Evaluasi Spasial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.5	e. Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.6	f. Konservasi Wawasan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.7	g. Konservasi Jenis Ikan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.8	h. Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.9	i. Mitigasi Bencana Lingkungan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.10	j. Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.11	k. Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.5.12	l. Rehabilitasi dan Reklamasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			500.5.5.13	m. Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	Rahasia	Eselon I	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemiripan dan reputasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.5.14	n. Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas	Unit Kerja Terkait
			500.5.5.15	o. Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.5.16	p. Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.5.17	q. Akses Permodalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.5.18	r. Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.5.19	s. Sosial Budaya Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.5.5.20	t. Pengembangan Usaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.5.6		6. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
			500.5.6.1	a. Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.2	b. Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.3	c. Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.4	d. Pengawasan Usaha Budidaya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.5	e. Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			500.5.6.6	f. Pengawasan Pencemaran Perairan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.7	g. Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.8	h. Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Nonhayati	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.9	i. Logistik dan Operasional Wilayah Barat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.10	j. Logistik dan Operasional Wilayah Timur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.11	k. Perawatan Kapal Pengawas	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.12	l. Pengawasan Kapal Pengawas	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.13	m. Sistem Pemantauan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.14	n. Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.15	o. Pemantauan Sumber Daya Perikanan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait



NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				500.5.7.16	p. Penutupan Suatu Area	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.17	q. Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.18	r. Pengawasan Peraturan Perkarantina	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.19	s. Pengawasan Pelaksanaan Operasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.20	t. Instalasi Karantina Sementara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.5.7.21	u. Lokasi Karantina	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
	500.6				<b>E. PERTANIAN</b>				
		500.6.1			1. Kebijakan di Bidang Pertanian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.2			2. Perlindungan Hortikultura				
			500.6.2.1		a. Teknologi Perlindungan Tanaman Buah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.2.2		b. Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.2.3		c. Teknologi Perlindungan Tanaman Hortikultura	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			500.6.3	500.6.2.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.3.1	500.6.3.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.3.2	500.6.3.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.3.3	500.6.3.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.4	500.6.4.1	500.6.4.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.4.2	500.6.4.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.4.3	500.6.4.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.4.4	500.6.4.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.4.5	500.6.4.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.5	500.6.5.1	500.6.5.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.5.2	500.6.5.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.5.3	500.6.5.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.5.4	500.6.5.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.6	500.6.6.1	500.6.6.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.6.6.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.6.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.6.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.7				
				500.6.7.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.7.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.7.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.7.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.8				
				500.6.8.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.8.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.8.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.9				
				500.6.9.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.9.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.9.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
			500.6.10	500.6.10.1	10. Budi Daya Sereal a. Padi Irigasi dan Rawa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.10.2	b. Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.10.3	c. Jagung	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.10.4	d. Sereal Lain	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.11	500.6.11.1	11. Budidaya Aneka Kacang dan Umbi a. Kedelai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.11.2	b. Ubi Kayu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.11.3	c. Aneka Kacang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.11.4	d. Aneka Umbi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.12	500.6.12.1	12. Tanaman Pangan a. Pengelolan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.12.2	b. Dampak Perubahan Iklim	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.6.12.3	c. Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			500.6.12.4	d. Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.13	500.6.13.1	13. Pascapanen Tanaman Pangan a. Padi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.13.2	b. Jagung dan Serealia lain	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.13.3	c. Kedelai dan Aneka Kacang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.13.4	d. Aneka Umbi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.14	500.6.14.1	14. Pengolahan Hasil Pertanian a. Tanaman Pangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.14.2	b. Hortikultura	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.14.3	c. Perkebunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.14.4	d. Peternakan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.15	500.6.15.1	15. Mutu dan Standardisasi a. Standardisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.15.2	b. Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.15.3	c. Akreditasi dan Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			500.6.15.4	d. Kerja Sama dan Harmonisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.16	500.6.16.1	16. Pengembangan Usaha dan Investasi a. Kemitraan dan Kewirausahaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.16.2	b. Investasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.16.3	c. Promosi Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.16.4	d. Promosi Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.17	500.6.17.1	17. Pemasaran Domestik a. Informasi Pasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.17.2	b. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.17.3	c. Sarana dan Kelembagaan Pasar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.17.4	d. Jaringan Pemasaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.18		18. Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja, dan Surat-Menyurat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.19	500.6.19	19. Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan a. Hasil Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.6.20	b. Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
			500.6.20		20. Diseminasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.21		500.6.21.1	21. Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian a. Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop b. Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.22			22. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.23			23. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.24			24. Data Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.25			25. Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.6.26		500.6.26.1	26. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) a. Hak Cipta	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.6.26.2	b. Hak Paten Sederhana	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.6.26.3	c. Hak Paten Biasa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.6.26.4	d. Hak Merek	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.6.26.5	e. Pendaftaran Varietas Tanaman	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.6.26.6	f. Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.6.26.7	g. Permohonan Hak yang Ditolak	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
			500.6.27	500.6.27.1 500.6.27.2	27. Pelayanan Perizinan Pertanian a. Sarana I (Bidang Pupuk, Pestisida, Alat, dan Mesin Pertanian) b. Sarana II (Bidang Benih Tanaman, Bahan Penelitian, Teknis Pangan Segar Asal Tumbuhan, Teknis Pengalihan Saham Perkebunan)	Biasa  Biasa	Eselon III  Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait  Unit Kerja Terkait
			500.6.28	500.6.27.3 500.6.28.1	c. Sarana III (Bidang Bibit, Karkas, Daging, dan Jerolan, Pakan Ternak, Obat Hewan, dan Teknis Sumber Daya Genetik Ternak) 28. Pelayanan Hukum a. Sertifikasi	Biasa  Terbatas	Eselon III  Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait  Unit Kerja Terkait
			500.6.29	500.6.28.2 500.6.29.1	b. Pertimbangan Hukum  29. Karantina Pertanian a. Karantina Tumbuhan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.6.30	500.6.29.2	b. Karantina Hewan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.6.31		30. Bimbingan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.7		31. Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.7.1		<b>F. PETERNAKAN</b> 1 Kebijakan di Bidang Peternakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.7.2		Pelayanan dan Kesehatan Hewan				

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.7.2.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.7.2.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.7.2.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.7.2.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.7.2.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.7.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.7.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.8.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

**G. PERKEBUNAN**

1. Kebijakan di Bidang Perkebunan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2. Tanaman Semusim

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			500.8.2.1	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.2.2	b. Perbenihan Tanaman Semusim	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.2.3	c. Budi Daya Teknologi Budi Daya Tanaman Semusim	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.2.4	d. Pemberdayaan Tanaman Semusim	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.8.3	500.8.3.1	3. Tanaman Rempah dan Penyegar a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.3.2	b. Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.3.3	c. Budi Daya Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.3.4	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.8.4	500.8.4.1	4. Tanaman Tahunan a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.4.2	b. Perbenihan Tanaman Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.4.3	c. Budi daya Tanaman Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.8.4.4	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.8.5		5. Perlindungan Perkebunan				

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				500.8.5.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.8.5.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.8.5.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.8.5.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.8.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.8.6.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.8.6.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.8.6.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.8.6.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.8.7	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.8.8	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.9	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.9.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.9.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.9.2.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				500.9.2.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
				<b>H. PERINDUSTRIAN</b>					
				1. Kebijakan di Bidang Perindustrian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
				2. Iklim Usaha dan Kerja Sama					
				a. Industri Manufaktur					
				b. Industri Agro					

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi d. Industri Kecil dan Menengah	Biasa Biasa	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait
		500.9.3	500.9.3.1	3. Promosi Industri a. Industri Manufaktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.3.2	b. Promosi Industri Agro	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.3.3	c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
			500.9.3.4	d. Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.9.4	500.9.4.1	4. Standarisasi dan Teknologi a. Industri Manufaktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.4.2	b. Industri Agro	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.4.3	c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
			500.9.4.4	d. Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.9.5	500.9.5.1	5. Hak atas Kekayaan Intelektual a. Industri Manufaktur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.9.5.2	b. Industri Agro	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.9.5.3	c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat	Unit Kerja Terkait
			500.9.5.4	d. Industri Kecil dan Menengah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		500.9.6		5. Industri Tifani				

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				a. Industri Manufaktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Industri Agro	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.9.7		7. Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.9.8		8. Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.9.9		9. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.9.10		10. Fasilitas Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.9.11		11. Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.9.12		12. Standardisasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				a. Standar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Penyiapan Penerapan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Infrastruktur Standar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.9.13		13. Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				a. Kebijakan Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Perpajakan dan Tarif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.9.13.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			500.9.13.3	c. Pengembangan Model Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.9.14	500.9.14.1	14. Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup a. Industri Hijau	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.14.2	b. Lingkungan Hidup	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.14.3	c. Energi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.9.15	500.9.15.1	15. Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual a. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.15.2	b. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.9.15.3	c. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.9.16		16. Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11		<b>I. PERHUBUNGAN</b>				
			500.11.1	1. Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.2	500.11.2.1	2. Jaringan Prasarana dan Pelayanan a. Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe Pengumpul dan Tipe Penunjang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.2.2	b. Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.11.2.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.7	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.8	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.2.9	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.3	500.11.3.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.3.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.4	500.11.4.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.4.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.4.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.4.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
			500.11.5	500.11.5.1	5. Teknologi Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.5.2	a. Sertifikasi Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.5.3	b. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.5.4	c. Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.6	500.11.6.1	d. Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.6.2	6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.7	500.11.7.1	a. Analisa Dampak Lalu Lintas Nasional di Luar Kawasan Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.7.2	b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.7.3	7. Perencanaan Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.7.4	a. Pedoman Teknis Perencanaan Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.7.5	b. Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.1	c. Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.11.8	500.11.8.2	d. Kualifikasi Teknis Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.1	e. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan di Jalan Nasional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.2	8. Angkutan Penumpang	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
					a. Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
					b. Izin Trayek Angkutan Penumpang untuk Trayek Lintas Batas Negara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.11.8.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.7	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.8.8	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.9	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.9.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.9.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.9.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.9.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.9.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.10	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.10.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.11.10.2	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.10.3	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.11		11. Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
				500.11.11.1	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.11.2	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.11.3	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.11.4	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.12		12. Analisa dan Evaluasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan				
				500.11.12.1	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.12.2	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.13		13. Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan				
				500.11.13.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.11.13.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.14			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.15		500.11.15.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.15.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.16			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.16.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.16.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.16.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.16.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.17			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.18		500.11.18.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.18.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.18.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.11.18.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.19		19. Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.19.1 500.11.19.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.19.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.20		20. Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 500.11.20.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.20.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.21		21. Tarif dan Keperintisan 500.11.21.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.21.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.22		22. Bina Sistem Transportasi Perkotaan 500.11.22.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.22.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.23		23. Lalu Lintas Perkotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	T					
				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan</li> <li>b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan</li> <li>c. Penanganan Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Teknologi di Wilayah</li> </ul>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan</li> <li>b. Jaringan Trayek Perkotaan</li> <li>c. Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi</li> </ul>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek untuk Angkutan Penumpang dan/atau Barang</li> <li>b. Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan yang Menghubungkan Antarsimpul (Bandara, Pelabuhan, Stasiun, dan Terminal) di Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi</li> <li>c. Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi</li> </ul>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Berwawasan Lingkungan</li> <li>b. Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan</li> </ul>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.11.30.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.30.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.31		500.11.31.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.31.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.31.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.32		500.11.32.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.32.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.32.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.11.33		500.11.33.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.33.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.11.33.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	500.12			500.12.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.12.2			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				a. Layanan Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Layanan Jasa Telekomunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Kelayakan Sistem Telekomunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.12.3		3. Penyiaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				a. Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.12.4		4. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				a. Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Telekomunikasi Khusus Nonpemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Layanan Khusus Penyiaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Pelayanan Kewajiban Universal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				e. Pengembangan Infrastruktur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.12.5		5. Pengendalian Informatika	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.12.5.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.5.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.5.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.5.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.12.6		500.12.6.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.6.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.6.3	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.6.4	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.6.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.12.7		500.12.7.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.7.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.12.7.3	c. Interoperabilitas dan Interkonktivitas e-Business	Terbatas	Eselon II Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.7.4	d. Aplikasi Layanan e-Business	Terbatas	Eselon II Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		500.12.8		500.12.8.1	8. Pemberdayaan Informatika Masyarakat a. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.8.2	b. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.12.9		500.12.9.1	9. Pemberdayaan Industri Informatika a. Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.9.2	b. Industri Perangkat Informatika Pengguna	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.9.3	c. Industri Perangkat Lunak	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.9.4	d. Industri Konten Multimedia	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.12.10		500.12.10.1	10. Keamanan Informasi a. Tata Kelola Keamanan Informasi	Terbatas	Eselon II Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.10.2	b. Teknologi Keamanan Informasi	Terbatas	Eselon II Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.10.3	c. Monitoring, Evaluasi, dan Tanggapan Darurat Keamanan Informasi	Terbatas	Eselon II Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	P	SP	S					
				500.12.10.4	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.10.5	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		500.12.11		500.12.11.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.11.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.11.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.12.12		500.12.12.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.12.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.12.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.12.13		500.12.13.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.13.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.13.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.12.14		500.12.14.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.12.14.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.14.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.15.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.15.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.15.3	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.16	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.16.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.16.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.16.3	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.12.17	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.17.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	P	SP	S	T					
			500.12.18	500.12.17.2 500.12.18.1	18. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat a. Pelayanan Informasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.18.2	b. Hubungan Masyarakat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.12.18.3	c. Bimbingan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.12.19			19. Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	500.13		500.13.1		<b>K. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b> 1. Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.13.2			2. Pengembangan Destinasi Wisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.2.1	a. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.2.2	b. Pengembangan Daya Tarik Wisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.2.3	c. Industri Pariwisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.2.4	d. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.2.5	e. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan <i>Event</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.13.3			3. Pemasaran Pariwisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.3.1	a. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.3.2	b. Promosi Pariwisata Luar Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.3.3	c. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.3.4	d. Pencitraan Indonesia	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.13.4			4. Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.4.1	a. Pengembangan Industri Perfilman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
				500.13.4.2	b. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.4.3	c. Pengembangan Seni Rupa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.13.5		5. Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK				
				500.13.5.1	a. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.5.2	b. Desain dan Arsitektur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.5.3	c. Kerja Sama dan Fasilitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.13.6		6. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
				500.13.6.1	a. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.6.2	b. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.6.3	c. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.13.6.4	d. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	500.14				<b>L. STATISTIK</b>				
			500.14.1		1. Kebijakan di Bidang Statistik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.14.2		2. Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.2.1	a. Perencanaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			500.14.2.2	<p>b. Persiapan, antara lain: Penyusunan Rancangan Organisasi Kegiatan Sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan Konsep dan Definisi, Penyusunan Metodologi (Cakupan, Organisasi, Lapangan, Ukuran Statistik, Prosedur), Penyusunan Buku Pedoman (Pencacahan, Pengawasan, Pengolahan), Penyusunan Peta Wilayah Kerja dan Muatan Peta Wilayah, Penyusunan Pedoman Sosialisasi, Sosialisasi Kegiatan kepada <i>Stakeholder</i> dan Sumber Data (<i>Leaflet</i>, Poster, Pertemuan), Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi (Intern dan Ekstern), Pelaksanaan Pelatihan Instruktur (TOT), Pelaksanaan Pelatihan Petugas, Penyusunan Program Pengolahan (<i>Rule Validasi</i>, Pemeriksaan Data Entri, Tabulasi), Pelatihan Petugas Pengolahan, Perancangan Tabel, Pelaksanaan Uji Coba</p>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.14.2.3	c. Pelaksanaan Lapangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.14.2.4	d. Pengolahan, antara lain: Pengelolaan Dokumen (Penerimaan/Pengiriman, Pengelompokan/ <i>Batching</i> ), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean ( <i>Editing/Coding</i> ), Perakaman Data (Entri, <i>Scanner</i> ), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.14.2.5	e. Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.14.2.6	f. Diseminasi Hasil Sensus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.14.3		3. Survei				

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.14.3.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.3.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.14.3.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.3.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.3.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.3.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.14.4	500.14.4.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.4.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.4.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.14.4.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
		500.15						
		500.15.1			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.2			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.3			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.3.1			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.3.2			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.3.3			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.3.4			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.3.5			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.4			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.4.1			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.4.2			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.4.3			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.4.4			Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			500.15.5	500.15.5.1	5. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan a. Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.5.2	b. Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	Biasa	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.5.3	c. Tenaga Pelatihan	Biasa	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.5.4	d. Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	Biasa	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.6	500.15.6.1	6. Bina Pemagangan a. Pemagangan Dalam Negeri	Biasa	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.6.2	b. Pemagangan Luar Negeri	Biasa	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.6.3	c. Perizinan dan Advokasi Pemagangan	Biasa	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.6.4	d. Promosi dan Jenjang Pemagangan	Biasa	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.7	500.15.7.1	7. Produktivitas dan Kewirausahaan a. Pengembangan Promosi dan Kerja Sama Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.7.2	b. Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	Biasa	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.7.3	c. Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	Biasa	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.7.4	d. Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.8		8. Pengembangan Pasar Kerja			

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.15.8.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.8.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.8.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.8.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.9		500.15.9.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.9.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.9.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.9.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.10		500.15.10.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.10.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.10.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.10.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.11		500.15.11.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
			500.15.11.2		b. Pembakuan Akreditasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.12			12. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.12.1		a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.12.2		b. Perjanjian Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.12.3		c. Kesejahteraan Pekerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.12.4		d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.13			13. Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.13.1		a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.13.2		b. Kelembagaan Hubungan Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.13.3		c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.14			14. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.14.1		a. Pengupahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.14.2		b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.15			15. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.15.15.1		a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
				500.15.15.2	b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.15.3	c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.16			16. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				
				500.15.16.1	a. Pengawasan Norma Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.16.2	b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.16.3	c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.17			17. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak				
				500.15.17.1	a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.17.2	b. Pengawasan Norma Kerja Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.17.3	c. Kerja Sama Lintas Sektoral	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.17.4	d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.18			18. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
				500.15.18.1	a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.18.2	b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.18.3	c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.15.18.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.18.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.19			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.20		500.15.20.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.15.20.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.15.20.3	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.15.20.4	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		500.15.21			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.21.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.21.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.21.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.21.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.15.22					22. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.15.22.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.22.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.22.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.22.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.22.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.15.22.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16				
				500.16.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.2.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.2.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.2.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.2.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.3.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				500.16.3.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.3.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.3.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.3.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.3.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.16.4	500.16.4.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.4.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.4.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.4.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.4.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.16.4.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.16.5	500.16.5.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				b. Kerja Sama Regional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				c. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		500.16.6		6. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.16.6.1	a. Pemantauan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.16.6.2	b. Data Realisasi Penanaman Modal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.16.6.3	c. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.16.6.4	d. Fasilitasi Penyelesaian Masalah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.16.6.5	e. Pengawasan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.16.6.6	f. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		500.16.7		7. Pelayanan Penanaman Modal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.16.7.1	a. Pelayanan Aplikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.16.7.2	b. Pelayanan Perizinan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				c. Pelayanan Konsultasi Perizinan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Pelayanan Nonperizinan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				e. Pelayanan Fasilitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.18		<b>O. TRANSMIGRASI</b>				
			500.18.1	1. Kebijakan di Bidang Transmigrasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			500.18.2	2. Penyediaan Tanah Transmigrasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				a. Fasilitas Pengadaan Tanah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				b. Pengurusan Legalitas Tanah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				c. Dokumentasi Pertanahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				d. Advokasi Pertanahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		500.18.3		3. Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				a. Penyiapan Lahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				b. Penyiapan Sarana	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				500.18.3.3	c. Penyiapan Prasarana	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.3.4	d. Evaluasi Kelayakan Permukiman	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		500.18.4		500.18.4.1	4. Fasilitas Penempatan Transmigrasi a. Penyiapan Calon Transmigrasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.4.2	b. Penyiapan Perpindahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.4.3	c. Pelaksanaan Perpindahan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.4.4	d. Penataan dan Adaptasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		500.18.5		500.18.5.1	5. Partisipasi Masyarakat a. Promosi dan Motivasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.5.2	b. Kerja Sama Kelembagaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.5.3	c. Kerja Sama Antar daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.5.4	d. Pelayanan Investasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	P	SP	S					
			500.18.6	500.18.6.1	6. Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi a. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	Terbatas	Eselon II Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.6.2	b. Bina Sistem Informasi	Terbatas	Eselon II Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.6.3	c. Perencanaan Pengembangan Kawasan	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.6.4	d. Perencanaan Pengembangan Masyarakat	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.6.5	e. Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Terbatas	Eselon II Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		500.18.7		500.18.7.1	7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat a. Bantuan Pangan dan Kesehatan	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.7.2	b. Fasilitas Sosial Budaya	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.7.3	c. Pengembangan Kelembagaan	Terbatas	Eselon II Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				500.18.7.4	d. Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		500.18.8		500.18.8.1	8. Pengembangan Usaha a. Kewirausahaan	Biasa	Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
				500.18.8.2	b. Produksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.8.3	c. Pengolahan Hasil dan Pemasaran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.8.4	d. Lembaga Ekonomi dan permodalan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.18.9		9. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan				
				500.18.9.1	a. Analisis dan Standardisasi Sarana dan Prasarana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.9.2	b. Pengembangan Sarana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.9.3	c. Pengembangan Prasarana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.9.4	d. Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			500.18.10		10. Penyerasian Lingkungan				
				500.18.10.1	a. Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.10.2	b. Adaptasi dan Mitigasi lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.10.3	c. Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				500.18.10.4	d. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
VII.	600	600.1	600.1.1	600.1.2	<b>PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN</b> <b>A. PEKERJAAN UMUM</b> 1. Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Penatagunaan Sumber Daya Air a. Perencanaan Wilayah Sungai b. Kelembagaan c. Pemanfaatan Sumber Daya Air d. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air e. Pengaturan dan Pemantauan 3. Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air b. Manajemen Mutu c. Informasi dan Data Sumber Daya Air d. Keterpaduan Pemrograman 4. Pengelolaan Sumber Daya Air a. Pengelolaan Sungai dan Pantai b. Pengelolaan Irigasi dan Rawa c. Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.2.1	600.1.2.3		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.2.2	600.1.2.4		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.2.3	600.1.2.5		Biasa	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.1.3.1	600.1.3.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.3.2	600.1.3.3		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.3.3	600.1.3.4		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.3.4	600.1.4.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.4	600.1.4.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.4.1	600.1.4.3		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.4.2						
			600.1.4.3						



NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				a. Standar dan Pedoman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Perencanaan Teknis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Teknik Jembatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		6000.1.11	6000.1.10.4	11. Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				a. Bimbingan Teknik Jalan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				c. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
		6000.1.12	6000.1.11.3	12. Pengaturan Jalan Tol	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				a. Persiapan penguasaan jalan tol	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				b. Pengadaan Investasi Jalan Tol	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				c. Teknik Pengaturan Jalan Tol	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Pengambilalihan Hak Penguasaan Jalan Tol	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		6000.1.13	6000.1.13.1	13. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				a. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			600.1.14	600.1.14.1 600.1.14.2 600.1.14.3 600.1.14.4 600.1.14.5	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.1.15	600.1.15.1 600.1.15.2 600.1.15.3 600.1.15.4 600.1.15.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.1.16	600.1.16.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				600.1.16.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.16.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.16.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.16.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.16.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.16.7	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				<b>600.1.17</b>				
				600.1.17.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.17.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.17.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.17.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.17.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.1.17.6	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				<b>600.1.18</b>				
					Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
		600.2						
			600.2.1		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.2.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.2.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.2.3	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.2.3		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.3.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.3.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.3.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.4		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.4.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.4.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.4.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.4.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			600.2.4.5	e. Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.2.5	600.2.5.1	5. Perencanaan Penyediaan Perumahan a. Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.5.2	b. Analisa Teknik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.5.3	c. Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.5.4	d. Kemitraan dan Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.2.6	600.2.6.1	6. Penyediaan Rumah Susun a. Perencanaan Teknik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.6.2	b. Penyediaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.6.3	c. Penghunan, Pengalihan, dan Pemanfaatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.6.4	d. Pengelolaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.2.7	600.2.7.1	7. Penyediaan Rumah Khusus a. Perencanaan Teknik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.7.2	b. Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.2.7.3	c. Bimbingan Teknis dan Supervisi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSEK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				600.2.10.1	a. Sistem Penyelenggaraan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.2.10.2	b. Kontrak Konstruksi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.2.10.3	c. Konstruksi Berkelanjutan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				600.2.10.4	d. Manajemen Mutu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.2.11		600.2.11.1	11. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.11.2	a. Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.11.3	b. Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.11.4	c. Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.2.12		600.2.12.1	12. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.12.2	a. Standar dan Materi Kompetensi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.12.3	b. Penerapan Kompetensi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.12.4	c. Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.2.12.4	d. Pengembangan Produktivitas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH	
	P	SP	S						T
			600.2.13	600.2.13.1 600.2.13.2	13. Peningkatan Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa a. Peningkatan Kerja Sama b. Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terbatas  Terbatas	Eselon II  Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait  Unit Kerja Terkait
			600.2.14	600.2.14.1 600.2.14.2	14. Peningkatan Jasa Konstruksi a. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja b. Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Biassa  Biassa	Eselon III  Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait  Unit Kerja Terkait
			600.2.15	600.2.15	15. Penerapan Teknologi Konstruksi a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerja Sama Penerapan Teknologi Konstruksi b. Pengembangan Materi	Biassa  Biassa	Eselon III  Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi  Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait  Unit Kerja Terkait
			600.2.16	600.2.16.1 600.2.16.2	16. Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan a. Antarsektor b. Antarwilayah	Biassa  Terbatas	Eselon III  Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi  Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait  Unit Kerja Terkait
			600.2.17	600.2.17.1	17. Pengembangan Kawasan Strategis a. Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait



NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			600.4.2.2	b. Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		600.4.3	600.4.3.1	3. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor a. Evaluasi Penerapan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.3.2	b. Perencanaan Lingkungan Hidup	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.4.4		4. Ekonomi Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.4.5	600.4.5.1	5. Dampak Lingkungan a. Bimtek Dampak Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.5.2	b. Penerapan Sistem Kebijakan Dampak Lingkungan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.5.3	c. Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.4.6		6. Pemantauan dan Pengawasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.6.1	a. Manufaktur Prasarana dan Jasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.6.2	b. Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.6.3	c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.6.4	d. Udara Sumber Bergerak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.4.7		7. Evaluasi dan Pengembangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.7.1	a. Manufaktur, Prasarana, dan Jasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	P	SP	S					
				600.4.7.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.7.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.7.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.8				
				600.4.8.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.8.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.8.3	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.8.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.8.5	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.9				
				600.4.9.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.9.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.10				
				600.4.10.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				600.4.10.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengendalian Bahan Perusak Ozon</li> <li>d. Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan</li> </ul>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.4.11	600.4.11.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Adaptasi Perubahan Iklim               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan, dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim</li> <li>b. Kerentanan Perubahan Iklim</li> </ul> </li> </ul>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.4.12	600.4.12.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>12. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Registrasi dan Notifikasi</li> <li>b. Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun</li> <li>c. Evaluasi dan Tindak Lanjut</li> </ul> </li> </ul>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.4.13	600.4.13.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>13. Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan dan Pemanfaatan</li> <li>b. Pengangkutan dan Pengolahan</li> <li>c. Penimbunan dan Dumping</li> <li>d. Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas</li> </ul> </li> </ul>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.4.14	600.4.14.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>14. Pengelolaan Limbah B3 dan Penulhan Kontaminasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan</li> </ul> </li> </ul>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			600.4.14.2	b. Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		600.4.15	600.4.15.1	15. Pengelolaan Sampah a. Pembatasan Sampah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.15.2	b. Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.15.3	c. Pembentukan Dewan Adipura	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.15.4	d. Penetapan Pemenang Adipura	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		600.4.16	600.4.16.1	16. Hukum Administrasi Lingkungan a. Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.16.2	b. Penataan Hukum Administrasi Lingkungan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		600.4.17	600.4.17.1	17. Penyelesaian Sengketa Lingkungan a. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			600.4.17.2	b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		600.4.18	600.4.18.1	18. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan a. Penyidikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.18.2	b. Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.18.3	c. Koordinasi Pembinaan Penyidik PNS	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			600.4.19	600.4.19.1 600.4.19.2	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.20	600.4.20.1 600.4.20.2	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.21	600.4.21.1 600.4.21.2	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.22	600.4.22.1 600.4.22.2	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			600.4.23	600.4.23.1 600.4.23.2 600.4.23.3 600.4.23.4	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
				700.1.1.5	d. Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.1.6	e. Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		0700.1.2		700.1.2.1	2. Pelaksanaan Pengawasan a. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang Memerlukan Tindak Lanjut (TL)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.2	b. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.3	c. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tidak Memerlukan Tindak Lanjut	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.4	d. Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.5	e. Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.6	f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.7	g. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				700.1.2.8	h. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan <i>Review</i>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			800.1.2.4	d. Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.2.5	e. Pengangkatan ASN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.2.6	f. <i>Open Bidding</i> (Seleksi Terbuka Jabatan)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.2.7	g. Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.2.8	h. Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi ASN	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		800.1.3	800.1.3.1	3 Mutasi Pegawai a. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antarperwakilan, Mutasi ke dan dari Perwalian, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.3.2	b. Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.3.3	c. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOJAH
	P	SP	S					
				800.1.3.4	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.3.5	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.3.6	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		800.1.4		800.1.4.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.4.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas	Unit Kerja Terkait
				800.1.4.3	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.4.4	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.4.5	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		800.1.5		800.1.5.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			800.1.5.2	b. Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja c. Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja 6. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN a. Kode Etik Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas	Unit Kerja Terkait
			800.1.5.3		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		800.1.6	800.1.6.1		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.6.2		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.6.3		Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.6.4	d. Pemberhentian dengan Tidak Hormat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.6.5	e. Pemberhentian Sementara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				800.1.6.6	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.7	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.8	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.8.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.8.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.8.3	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.8.4	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.9	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.9.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.9.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.9.3	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.9.4	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.10	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.10.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				800.1.10.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				g. Cuti di Luar Tanggungan Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.7	h. Karpeg/KPE/Karis/Karsu	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.8	i. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.9	j. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.10	k. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.11	l. Daftar Urut Keangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.12	m. Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.13	12. Kesejahteraan Pegawai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		800.1.12	800.1.12.1	a. Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.2	b. Asuransi Pegawai/BPJS	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.3	c. Tabungan Perumahan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.4	d. Bantuan Sosial	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.5	e. Pakaian Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.6	f. Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.7	g. Pemberian Tali Kasih	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.8	h. Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				800.1.12.9 800.1.12.10	Biasa Terbatas	Eselon III Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait
		800.1.13		800.1.13.1 800.1.13.2 800.1.13.3 800.1.13.4 800.1.13.5	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon II Eselon II Eselon II Eselon II Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait
		800.1.14		800.1.14.1 800.1.14.2	Terbatas Terbatas	Eselon II Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait
	800.2			800.2.1 800.2.2 800.2.2.1	Biasa Biasa Biasa	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				b. Pedoman-Pedoman Kekelakatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Kurikulum-Kurikulum Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Modul-Modul Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				e. Panduan Fasilitator	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				f. Saran/Rekomendasi Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				g. Notulen Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				h. Monitoring dan Evaluasi Program dan Pembinaan Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				i. Konsultasi, Advokasi, Asistensi Diklat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		<b>800.2.3</b>		3. Widyaaiswara				
				a. Seleksi dan Pengembangan Widyaaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				b. Sertifikasi Widyaaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				c. Monitoring dan Evaluasi Widyaaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				d. Penilaian Widyaaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				e. Konsultasi, Advokasi, dan Asistensi Widyaaiswara	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			800.2.3.6	f. Sistem Informasi Pembinaan Widyaaiswara	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		800.2.4	800.2.4.1	4. Penyelenggaraan Diklat a. Perencanaan, Peserta, Pengajar, Penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.2.4.2	b. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.2.4.3	c. Konsultasi, Advokasi, Asistensi Penyelenggaraan Diklat	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.2.4.4	d. Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.2.4.5	e. Sistem Informasi Diklat	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.2.4.6	f. Monitoring Penyelenggara Diklat	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			800.2.4.7	g. Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		800.2.5		5. Alumni	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
X	900	900.1	900.1.1	900.1.1.1	<b>A. KEUANGAN DAERAH</b> 1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2. Penyusunan Anggaran a. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan b. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota c. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang Telah Disetujui Sekretaris Daerah d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang Telah Disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 3. Pelaksanaan Anggaran a. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS b. Pendapatan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.1.2		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.1.3		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.1.4		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		900.1.2	900.1.2.1			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.2.2			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.2.3			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.2.4			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		900.1.3	900.1.3.1			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.2			Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			900.1.3.3	c. Belanja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.4	d. Pembiayaan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.5	e. Dokumen Penatausahaan Keuangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.6	f. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.7	g. Daftar Gaji	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.8	h. Kartu Gaji	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.9	i. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.10	j. Laporan Keuangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		900.1.4	900.1.4.1	4. Pinjaman/Hibah Luar Negeri a. Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ( <i>Blue Book</i> )	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.2	b. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membayai ( <i>Green Book</i> )	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			900.1.4.3	c. Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan Dokumen Sejenisnya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.4	d. Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHILN), antara lain: <i>Draft Agreement, Legal Opinion</i> , Surat Menyurat dengan <i>Lender</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.5	e. Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.6	f. Aplikasi Penarikan Dana BLN Berikut Lampirannya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.7	g. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana ( <i>Payment Advice</i> )	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.8	h. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM Beserta Lampirannya (SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung Lainnya)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.9	i. <i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor), antara lain : <i>No Objection Letter</i> (NOL), <i>Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization</i> (WA)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.10	j. <i>Staff Appraisal Report</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.11	k. <i>Report /Laporan</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.12	l. Laporan Hutang Daerah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.13	m. <i>Completion Report/Annual Report</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			900.1.4.14	n. Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		900.1.5		5. Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		900.1.6	900.1.6.1	6. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) a. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.6.2	b. Dokumen Kebijakan Akuntansi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
			900.1.6.3	c. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.6.4	d. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		900.1.7	900.1.7.1	7. Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan a. Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, Termasuk Spesimen Tanda Tangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.7.2	b. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan Lampirannya, antara lain: SPP-SP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI				JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S	T					
				900.1.7.3	c. Buku Rekening Bank	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.7.4	d. Keputusan Pembukuan Rekening	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.7.5	e. Pembukuan Anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.8		8. Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan				
				900.1.8.1	a. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.8.2	b. Berkas Penerimaan Pajak Termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK ARSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	T					
		900.1.9		9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD, antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		900.1.10		10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu				
			900.1.10.1	a Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.10.2	b. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.10.3	c. Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu Termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu Termasuk Diantaranya Bukti Transfer Bank	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOM
	P	SP	S					
				900.1.10.4	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		900.1.11		900.1.11.1	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.11.2	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.11.3	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
				900.1.11.4	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		900.1.12		900.1.12.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.12.2	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		900.1.13		900.1.13.1	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			900.1.13.2	b. Badan Usaha Milik Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan, Fasilitas, serta Bimbingan Teknis di Bidang Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Nonkeuangan, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.13.3	c. Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: Analisis, Standardisasi Teknis, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan, Standardisasi Teknis, Prosedur dan Kriteria, Fasilitas Serta Bimbingan Teknis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.13.4	d. Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitas serta Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan, Fasilitas serta Bimbingan Teknis Investasi Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Investasi Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.13.5	e. Pinjam Dan Obligasi Daerah, antara lain: Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Obligasi Daerah, Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Dana Bergulir yang Bersumber dari APBN, Bimbingan Teknis Obligasi Daerah, Dana Bergulir Serta Pertanyaan Modal Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah, Obligasi Daerah dan Dana Bergulir, dan Pertanyaan Modal Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	P	SP	S						T
			900.1.14	900.1.14.1	14. Fasilitasi Dana Perimbangan a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Penghantuan, dan Rekonsiliasi Dana Alokasi Umum, Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Umum, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Umum	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.14.2	b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar. Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Khusus, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dana Alokasi Khusus	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.14.3	c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Perhitungan, dan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Sosialisasi dan Supervisi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.14.4	d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi dan Supervisi Dana Otonomi Khusus, Sosialisasi dan Supervisi dan Transfer Lainnya, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				900.1.14.5	e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan dan Perimbangan, Penyiapan Dukungan Teknis Dana Perimbangan, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Dana Perimbangan	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.15		15. Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah				

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
			900.1.15.1	a. Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitas serta Bimbingan Teknis di Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.15.2	b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitas serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.15.3	c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitas serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
			900.1.15.4	d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, antara lain: Penyiapan Bahan Bantuan Keterangan Ahli di Bidang Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

JENIS ARSIP

NO.	KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	P	SP	S					
				900.1.15.5	Biassa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
				e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Penyajian Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Penyajian Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah				

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	PARAF
1	Setelah		
2	Asisten III		
3	Kabag Hukum		
4	Kadis Perpustakaan		
	Kalbid Keatsipan		

Pj. BUPATI BOMBANA

BURHANUDDIN